Dr. M. Amien Rais

Hubungan antara

Politik & Dakwah

Berguru kepada M. Natsir

Hubungan antara Politik dan Dakwah

Berguru kepada M. Natsir

Dr. M. Amien Rais

Hubungan antara Politik dan Dakwah

Berguru kepada M. Natsir

Mujahid

Hubungan antara Politik dan Dakwah

Berguru kepada M. Natsir

Penulis:
Prof. Dr. M. Amien Rais

Penyunting:
Lilis Nihwan

Layout/Desain Sampul:
Mujahid Grafis

Penerbit:
Mujahid

Jl. Tambakan Rt. 1/1 Bojongkunci
Pameungpeuk Bandung 40376
Kotak Pos 11 Banjaran Bandung 40377
Tlp/Fax. (022) 5943620 HP. O81.2205.6466
e-mail: mujahidpress@yahoo.com

Cetakan Pertama: Dzulqa'dah 1424 H/Januari 2004 M
Cetakan Kedua: Shafar 1425 H/April 2004 M

Kata Pengantar

Betapapun kecil dan sederhananya buku ini dari segi penggarapan, namun sungguh menyisakan kenangan yang hangat dan tak bisa dilupakan. Mondar-mandir Bandung-Yogya, naik kereta ekonomi bagian dari romantisme pengalaman. Dan rentang waktu yang cukup panjang.

Saya punya ratusan kliping tulisan pak Amin Rais. Saya mengoleksinya sejak pertengahan 1997. Isinya membicarakan hal-hal yang bersipat situasional-kondisional. Tentu saja banyak menulis tema-tema kajian.

Sudah sangat lama tersimpan maksud ingin menawarkan tulisan-tulisan Pak Amien ke penerbit. Awal 1998 merupakan permulaan memburu Pak Amien untuk memperoleh izin untuk tentang

sejumlah tulisannya untuk dibukukan. Alhamdulilah, pertengahan 1998 sayamendapatkan izin dipusat pengkajian strategi kebijakan (PPSK) yogyakarta.

Dari sejumlah tulisan, penerbit Mujahid Press memilih beberpa judul saja yang di nilai akan terus relevan atau diperlukan oleh kalangan pembaca. Alias bersipat kajian. Kajian dalam umat islam dengan lokomotuip lain kontemplasisosial keumatan, terutama menumpu pada islam sebagai gerakan umat dalam dakwah dan politik.

Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Prof.DR.HM.Amien Rais, aktivitas PPSK-Yogya, Mujahid Press, KH.Mukhtar Adam, Idi Subandy Ibrahim, Taupan Hidayat, Miftah Fauzi Rakhmat, Erwan Juhara, Hamidi SAg, Fahrul Anam Mag, Hapipudin SAg, Suhendi SAg, Iyas Supardi Rustam SThI, Kurtami SThI, Nasutiyon Ama,keluarga Bu Syam'un. Terima kasih kepada media massa: *Prisma,Tempo,Media Dakwah,Panji Masyarakat, dan Al-Muslimun.* Dan siapa saja yang turut mendukung terwujudnya buku ini, secara terang-terangan atau sambil diam-diam.

Penyunting

Daftar Isi

Hubungan antara Politik dan Dakwah

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power) dan sebagaimana dikatakan C.O. Key, Ir., seorang pakar ilmu sosial, politik terutama terdiri dari hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submissi, antara yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan George Catlin memberi ta'rif politik sebagai *"the ant of human or social control"*. Lebih jelas lagi pengertian yang diberikan oleh Horold Lasswell bahwa politik menyangkut "who gets what, when, how". What disini terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik, sedangkan siapa, kapan dan bagaimana adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat.

Politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik kepentingan antar golongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan dalam politik domestik, maupun luar negeri dan lain sebagainya adalah contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi etika dan moral yang dianut.

Bagi seorang marxis, suatu tindakan politik adalah baik bila tindakan itu menguntungkan kaum proletar, memperlemah posisi dari apa yang mereka namakan kelas borjuis dan menuju revolusi sosial ke arah masyarakat tanpa kelas. Bagi seorang sekularis-pragmatis, suatu tindakan politik adalah baik bila dapat memberi "benefit" atau keuntungan praktis dan manfaat materil, walaupun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan bagi seorang Muslim suatu tindakan politik adalah baik bila tindakan tersebut berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan ajaran "rahmatan lil 'alamien".

Dengan demikian, dari tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (high politics) dan politik kualitas rendah (low politics). Paling tidak ada tiga ciri yang harus dimiliki politik berkualitas tinggi atau oleh mereka yang menginginkan terselenggaranya "high politics", yakni:

Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanah (trust) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri atau menguntungakan golongan sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus

dilihat sebagai ni'mat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib sosial yang egalitarian. Kekuasaan betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanat atau "message" yang telah dipercayakan oleh masyarakat luas.

Seseorang apakah ia duduk di lembaga eksekutif, legislatif, judikatif atau duduk dalam "pressure groups" yang berpengaruh atau memegang posisi kunci dalam suatu organisasi. Sesungguhnya memiliki "power" tertentu. Kekuasaan ini tidak boleh dipisahkan dari amanah yang harus terus mengarahkan pengguna kekuasaan itu.

Kedua, erat dengan yang tersebut di atas, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya *mas'uliyyah* atau pertanggungjawaban (accountability). Sebagaimana diajarkan Nabi saw. setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggung jawab ini sangat menentukan dalam usaha kita menyelenggarakan politik berkualitas tinggi. Akan tetapi tanggungjawab ini bukan terbatas di hadapan institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan, lebih penting lagi adalah tanggung jawab di hadapan Allah, di depan mahkamah yang paling adil besok di akhirat. Membicarakan *mas'uliyyah* di depan Tuhan bagi telinga kaum sekularisme-pragmatis barangkali kedengaran janggal, apalagi bagi kaum marxis yang memang atheistis. Hanya saja selalu kita ingat bahwa Al-Qur'an dan Hadits dalam berbagai tempat

menggarisbawahi mutlak pentingnya iman kepada Allah dan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya. Seorang politikus, pejabat atau negarawan yang kesadaran tanggungjawabnya pada Tuhan sangat dalam, secara otomatis memiliki "built-in control" yang tidak ada taranya. Ia memiliki kendali diri (self-restraint) yang sangat kuat untuk tidak terperosok ke dalam rawa-rawa kemunafikan.

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah *(brotherhood)*, yakni persaudaraan di antara sesama umat manusia. *Ukhuwah* dalam arti luas melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Misalnya, setiap orang, terlepas dari latar belakang manapun ia datang, jika dipukul pasti merasa sakit, jika tidak makan pasti lapar dan seterusnya. Oleh karena itu, kegiatan politik kualitas tinggi akan menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Sebaiknya, gaya politik yang diambil adalah yang penuh dengan ukhuwwah, mencari saling pengertian dan membangun kerjasama dunia seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhilafahan.

"High politics" dengan ciri-ciri minimal seperti disebutkan diatas sangat kondusif bagi pelaksanaan amar ma'ruf dan nahyu munkar. Barangkali inilah antara lain yang dimaksud oleh surat al-Hajj ayat 41: *"Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakkan shalat, membayar zakat dan menyuruh (manusia) berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan; dan bagi Allah sajalah kembalinya segala macam urusan".*

"High politics" dalam kenyataan memang terasa sangat ideal, tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi bahkan di negara-negara maju. Bahkan di Amerika, di negara yang merupakan jagonya demokrasi, politik kualitas tinggi merupakan barang yang sangat mewah dan langka. Oleh karena itu, ada seorang politikus Amerika yang mengakui bahwa Amerika adalah *"a country that holds a dangeous disdain for politicians"* atau sebuah negeri yang punya cemooh berbahaya bagi para politisi.

Mengapa demikian ? karena di Amerika berlaku, politik sekular yang cenderung menjurus pada *"low politics"*. Di negara-negara berkembang, bahkan di negeri-negeri muslim, politik kualitas rendahan pada umumnya justeru dominan. Ditunjau dari sudut pandang Islam, politik semacam ini tidak mendukung maksud-maksud dakwah, tetapi justru menjegal dakwah, merusak rekonstruksi masyarakat yang islami. Agaknya kita perlu melihat sejenak ciri-ciri "low politics" itu.

Dalam pembicaraan sehari-hari kita sering mendengar istilah politik Machiavellis dengan konotasi otomatis sebagai politik yang tidak sehat, penuh hipokrisi, kelicikan dan sebagainya. Dalam pembahasan akademik, Machiavelli itu sendiri merupakan tokoh yang kontroversial. Namun ajaran-ajaran politiknya yang terkandung dalam bukunya *The Prince* memang merupakan jenis politik yang tidak dapat digolongkan *"high politcs"*, dan dari kacamata dakwah jelas destruktif, setidak-tidaknya *counter-productive*. Baiklah lihat sejenak sebagian gagasan-gagasannya yang dimuat dalam bukunya yang tersohor itu.

Pertama, Machiavelli mengingatkan bahwa kekerasan (Violence, brutalitas dan kekejaman) merupakan cara-cara yang seringkali perlu diambil oleh penguasa. Malahan ada seorang ahli yang mengatakan, Machiavelli adalah seorang guru dalam *"economy of violence"* . Baginya, kekerasan, brutalitas dan kekejaman dapat digunakan kapan saja asal tujuan yang dikejar dapat dicapai. Karena itu terkenal dengan semboyan: tujuan menghalalkan cara. Pandangan seperti ini mendorong manusia yang bergerak di bidang politik menjadi "tega dan tegel" dan menjadi *"cold – blooded"* alias berdarah dingin. Melangkahi mayat orang lain untuk mencapai tujuan sendiri dianggap sebagai suatu hal wajar-wajar saja. Kekuasaan sebagai amanah dan nimat dari Tuhan yang harus dipergunakan sebaik-baiknya, tidak dikenal sama sekali dalam ajaran ini.

Kedua, penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai *summum bonum* atau kebajikan puncak. Musuh tidak boleh diberikan kesempatan untuk bangkit dan kalau perlu diperlakukan sebagai barang bukan sebagai manusia. Politik berintikan pada perjuangan untuk merebut kekuasaan (*struggle for power*) dan instabilitas pemerintahan biasanya disebabkan oleh nafsu kuasa manusia yang tidak mengenal batas *(the limitless human appetite for power).* Oleh sebab itu, bagi yang sedang berkuasa, kata Machiavelli, operasi dan supresi atau penindasan dan penekanan serta penaklukan terhadap musuh-musuh politik harus dilakukan, karena sekali lagi, penaklukan adalah *summum bonum.* Di sini konsep

ukhuwah atau persaudaraan di antara umat manusia tidak sedikitpun terlintas dalam benak Machiavelli.

Ketiga, dalam menjalankan kehiduupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus anjing pemburu. Kebuasan singa akan menakutkan srigala, sementara kecerdikan dan kelicikan anjing pemburu dapat menghindari jebakan-jebakan. Seorang pengusa harus dapat menjadi anjing pemburu untuk mengenali berbagai perangkap dan dapat menjadi singa untuk menggertak manusia-manusai srigala. Mereka yang bertingkah seperti singa saja tidak akan waspada. Orang yang dapat berperan seperti anjing pemburu akan jadi pemain politik terbaik, tetapi ia harus tahu bagaimana bersikap seperti musang berbulu ayam. Pada umumnya manusia berfikir sangat bersahaja dan menyerah pada kebutuhan-kebutuhan mendesak sehingga seorang penguasa yang suka menipu pasti akan menemukan orang-orang yang membiarkan dirinya untuk ditipu.

(*Since, then, a prince is necessitaded to play the fox and the lionm, bicause the lion does not protect him self from traps; the fox does not protect him self from the wolves the prince must be a fox therelore tcrecognize the traps and a lion to frighten the wolves. Those who rely on the lion alone are not perceptive. The one who knows best how to play the fox comes out best, but he must understand well how to dissguise the amimal's nature and must simple-minded are men and so controlled by immediate necessities that a prince who deceives always finds men wholet themseleves be deceived*).

Kehidupan wejangan-wejangan Machiavelli ditujukan kepada sang pangeran sebagai penguasa, tetapi banyak sekali politisi yang menimba ajaran-ajaran Machiavelli tadi dan mempraktekannya dalam kehidupan politik. Dalam karyanya yang lain, yakni *Discoure on the First Ten Books of Titud Livius*. Machiavelli mengemukakan pikiran-pikiran politiknya yang lebih memperhatikan etika moral dan agama tetapi bukannya. The Prince sudah terlanjur tersohor, sehingga kebanyakan orang sering mencukupkan diri dengan membaca buku tersebut. Kiranya gampang dimengerti bahwa politik ala Machiavelli ini juga tidak berbicara sama sekali tentang masa'uliyyah (acountability) manusia dihadapan Allah.

"Low politics" gaya Machiavelli ini mudah diserap karena naluri-naluri dan nafsu rendah manusia ditampung secara luas. Barangkali tidak perlu kita jelaskan lebih jauh bahwa jenis politik ini tidak akan pernah berjalan paralel dengan tujuan dakwah.

Setelah kita uraikan serba singkat tentang dua jenis politik dan hubungan fungsional antara high politics dan dakwah dalam arti luas maka kiranya perlu dibicarakan juga perlunya kaum Muslimin mengembangkan profesionalisme politik yang tipikal Islam. Di zaman modern sekarang bidang politik memang harus diterjuni secara profesional dan seyogianya dimasuki secara amatiran. Akan tetapi profesi politik yang dimaksud disini bukan dimengerti oleh sementara orang bahwa menipu adalah "tugas" pokok kaum politisi. Misalnya ada sarjana yang berpendapat sebagai kejahatan yang perlu, baik

tingkah laku maupun eksistensi mereka sebaiknya dimaafkan saja. Kiranya dapat diterima akal bila demi tuntunan profesinya, seorang serdadu harus membunuh dan seorang politikus harus menipu". (*Because poliricians are regarded as necess ary evils, both their conduct and existence are condoned. It is thought that by the necessities oe his protession a soldier must kill and a polirician lie).* Keharusan menipu dalam profesi politik bukankah apa yang dimaksudkan di sini.

Yang jelas perkembangan zaman telah menuntut spesialisasi dan pembagian tugas dalam kehidupan masyarakat modern politik, sebagai salah satu bidang kegiatan hidup yang berhubungan dengan masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan serta proses pembuatan keputusan dalam berbagai kebijaksanaan di tingkat nasional, regional dan lokal, dewasa ini memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri. Karena itu tidak sembarang orang misalnya dapat menjadi anggota parlemen atau pejabat eksekutif atau memegang jabatan-jabatan politik lainnya.

Di kalangan umat Islam, harus dibutuhkan kader-kader politik yang tangguh beraqidah dan menguasai persoalan-persoalan politik serta kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya, psikologi dan lain sebagainya. Masalah-masalah politik tidak dapat digarap dengan sambil lalu dan tanpa pengetahuan yang cukup. Jangan yang terjun ke bidang politik adalah mereka yang tanpa bekal pengetahuan dan pemahaman Islam secara benar. Bila wawasan dan cakrawala pengetahuan politik dan kemasyarakatan sangat

sempit, bukan mustahil lantas timbul keanehan-keanehan. Misalnya tokoh-tokoh di kalangan umat kemudian bersitegang, bukan berkonfrontasi satu sama lain hanya sebuah kursi di parlemen. Atau saling tuduh-menuduh dan perang terbuka di media massa. Bahkan tidak jarang fitnah dijadikan alat berpolitik, sementara fitnah itu sendiri, menurut Qur'an, secara moral lebih gawat daripada pembunuhan.

Low politics seperti ini dapat terjadi di kalangan umat karena antara lain politik belum didekati secara profesional dan kebanyakan pelaku politik barangakali saja belum bersedia menggunakan moralitas dan etika Qur'an dengan konsekuen. Di samping itu situasi umum memang mencerminkan berlakunya *low politics* di atas, sehingga lebih mudah berenang menurut arus daripada melawan arus. Untuk mengatasi amaturisme politik itulah diperlukan pengembangan profesionalisme politik di kalangan umat agar muncul kader-kader politik yang beraqidah berpengaruh luas, punya integritas dan memahami dengan baik kaitan fungsional antara politik dan dakwah. Bila umat sebagai keseluruhan sudah mampu memainkan *hiqh politics,* rekonstruksi masyarakat Islam insya Allah akan banyak tertolong. Politik di zaman modern menurut wawasan, dan kecakapan seorang ahlinya, jika kita tidak ingin melihat kehancuran.

Buat sementara orang, apa yang dikemukakan di atas barangkali terlalu ideal, bahkan *utopis.* Akan tetapi bila kita ingin memperbaiki keadaan, maka gambaran ideal tentang keadaan itu harus kita paparkan agar menjadi jelas ke mana kita harus pergi.

Bigitu juga bila kita berbicara tentang hubungan antara politik dan dakwah. Politik kulitas tinggi inilah yang dikehendaki ajaran-ajaran Islam. Bila dihadapkan dengan kenyataan yang berlangsung di mana *low politics* merajalela ditengah masyarakat, kita lantas menghadapi berbagai masalah yang dilematis. Memainkan kualitas politik tinggi di tengah samudra politik kualitas rendahan memang tidak gampang. Lebih sulit lagi merelevansikan politik dengan tujuan dakwah agar hubungan fungsional, dan hubungan organik di antara keduanya dapat berjalan mulus. Namun di sinilah justru terletak tantangan kita bersama.

Berguru kepada Mohammad Natsir

Kira-kira satu tahun terakhir ini saya mendatangi seminar internasional: pertama, seminar perdamain yang diadakan oleh Mu'tamar Alam Islam di Islamabad, Pakistan, kedua, seminar antar agama di Casablanca, Maroko; dan ketiga, seminar internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Satu hal sama yang selalu ditanyakan pada saya oleh berbagai delegasi dalam seminar-seminar itu adalah: Bagaimana kabar Dr. Natsir sekarang ?" Dan biasanya diikuti dengan kata-kata: "sampaikan salam saya padanya ".

Pada momen-momen seperti itu saya jadi makin menyadari bahwa tokoh kita Moh. Natsir, yang barangkali bisa disebut sebagai *"the second grand old*

man" setelah H. Agus Salim, memang sangat tenar di dunia Islam. Bukan saja kedudukannya sebagai salah seorang tokoh pucak Rabithah Alam Islam, wakil presiden Mu'tamar Alam Islam dan pemilik "Chair" untuk studi Islam di Universitas Oxford, tetapi nampaknya juga semangatnya yang tanpa lelah dalam usaha da'wah Islam telah menyebabkan nama Natsir selalu bergaung di dunia Islam. Corat-coret ringan di bawah ini saya buat sekedar memperingati ulang tahunnya yang ke-78 pada 17 Juli 1986 yang lalu.

Sederhana dan Jujur

Kesan saya tentang pak Natsir sejak dulu sampai sekarang belum pernah berubah. Kesederhanaan barangkali merupakan sifatnya yang cukup menonjol. Sebagai bekas perdana menteri dan sebagai tokoh Islam internasional yang tetap aktif, kehidupan tidak berbeda jauh dengan kehidupan kebanyakan rakyat. Ketika dikeluarkan dari tahanan orde lama, pak Natsir bahkan mengahadapi masalah "mancari rumah". Nampaknya ketika jadi menteri serta ketika memimpin partai masyumi dulu, ia tidak sampai memikirkan rumah. Barangkali hal seperti ini merupakan sesuatu yang aneh menurut sementara orang. Tetapi itulah tokoh Natsir yang agaknya merupakan manusia langka di zaman sekarang. Malah pada waktu saya bertemu dengan pak Muis, salah seorang tokoh umat di Banjarmasin yang juga sahabat pak Natsir, saya dapat cerita aneh. Suatu ketika pak Muis kehabisan bekal di Jakarta sewaktu

mau pulang ke Banjarmasin. Merasa sebagai sahabat, ia mencoba pinjam uang dari pak Natsir yang perdana menteri. Apa jawaban Natsir ? "Kalau mau pinjam yang pribadi kebetulan saya tidak punya. Tetapi saudara bisa pinjam uang dari majalah Hikmah yang saya pimpinan. Nanti pinjaman itu diperhitungkan dengan majalah Hikmah". Waktu mendengar cerita ini saya berkata dalam hati, seperti tidak percaya, bagai-mana mungkin seorang yang menduduki jabatan demikian tinggi sampai tidak mempunyai uang.

Namun dari sini saya segera memahami mengapa pak Natsir memperoleh kepercayaan internasional begitu besar. Amanat apapun menjadi aman lewat tangannya. Bahkan mendiang Ali Murtopo pernah meminta pak Natsir untuk menulis surat ke suatu negara di Timur Tengah agar mempermudah pelaksanaan pinjaman bagi Republik Indonesia. Permintaan itupun dilakukan dengan ikhlas. Dan... berhasil. Nampaknya kesadaran dan kejujuran merupakan dua saudara kembar. Pemimpin yang jujur selalu cenderung sederhana, lebih mudah memelihara kejujuran.

Ideologi dan Program.

Pada 1967 sewaktu saya masih mahasiswa, saya pernah berdesakan di Sitihinggil Pagelaran, kampus UGM, untuk mendengar ceramah pak Natsir yang baru saja keluar dari Wisma Keagungan, rumah tahanan orde lama di Madiun. Saya masih ingat berebut kursi dengan saudara Yahya Muhaimin. Saya dan teman-teman mengharapkan pak Natsir akan

mendapat dan mengkritik pedas orde lama, sesuai semangat mahasiswa pada waktu itu.

Ternyat kami keliru. Tidak sedikit pun ada kritik tajam, apalagi dampratan yang kami ramalkan. Hanya kami diingatkan agar pandai-pandai belajar dari sejarah. Agaknya selain Pak Natsir memaafkan orde lama yang memenjarakannya, ia tidak mau menoleh ke belakang terlalu lama. Menatap masa depan jauh lebih penting. Waktu itu Isu penting di berbagai surat kabar adalah deideologisasi sebagai prasyarat modernisasi. Ideologi di tuding banyak tokoh intelektual sebagai sumber malapetak, yang penting itu program. Adu program paling baik untuk pembangunan dan isyu-isyu semacamnya.

Ketika kami para mahasiswa sedang asyik terbuai dengan isyu deideologisasi, depolitisasi, deparpolisasi, dan pentingnya program, program dan program, Pak Natsir dalam ceramah di Sitihinggil itu kira-kira berkata: *"Ingat, ideologi dan program adalah two sides of the same coin, dua sisi dari satu mata uang yang sama. Karena manusia bukan robot, ia tidak mungkin hidup hanya dengan ideologi tanpa program atau hanya dengan program tanpa ideologi"*. Kata-kata yang diformulasikan sangat sederhana ini bagi kami waktu itu merupakan "eyeopener" alias pemuka mata, sehingga lantas dapat melihat masalah dengan jernih. Alamarhum Prof. Mr. Hardjono, salah seorang dosen kami, esok harinya mengatakan dalam kelas dengan gaya Solo-nya: yang berceramah kemarin di kampus kita itu betul-betul manusia, manusia dengan "M" besar.

Kyai dan Grossroots

Dalam kesempatan informal beberapa tahun yang lalu di Yogyakarta, ketika Pak Natsir mengunjungi almarhum Pak A. R. Baswedan, kami sempat omong-omong dengan beliau. Salah satu komentar yang menarik dari Pak Natsir adalah perlunya kerjasama yang baik antara para cendekiawan Muslim di berbagai kempus dengan para kyai di daerah pedesaan.

Umat Islam di pedesaan perlu sekali memperoleh bimbingan dan merekalah yang menjadi "grassroots". Fungsi para kayai menentukan untuk kemajuan umat pada level "grassroots" itu, sehingga harus ada "partnership" yang harmonis antara para kyai dan kaum cendekiawan. Harus dihindari orientasi elitis dari para cendekiawan kita. Mereka tidak boleh duduk di menara gading dari seminar ke seminar, dari proyek ke proyek. Mereka perlu turun ke bawah dan ikut membangun serta mencerdaskan kehidupan umat di bawah.

Pak Natsir memberikan sebuah contoh, bagaimana sebuah desa yang miskin sulit dibujuk untuk bertransmigrasi. Para petugas hampir putus asa mengajak penduduk desa itu untuk melakukan transmigrasi. Barulah setelah sang kyai desa itu berfatwa tentang perlunya pindah ke bagian bumi Allah yang lainnya yang masih luas dan subur di tanah air, dan sang kyai itu bersedia bertransmigrasi bersama-sama, maka persoalan jadi pecah. Pendeknya kyai-kyai di desa itu sebagai pemimpin-pemimpin informal, punya posisi menentukan dalam membina umat pada tingkat "grassroots". Kaum intelektual

Muslim harus bekerjasama dengan para kyai dalam rangka konsolidasi umat.

Jangan Tinggalkan Rumah Kering

Soal lain yang cukup menarik yang dikemukakan pak Natsir ketika itu adalah bahwa dalam berusaha membuat amal shalih yang besar, kita harus cekatan dalam membangun kerjasama umat. Jangan ada yang ditinggalkan. Istilahnya, rumput kering pun pasti ada manfaatnya. Masalahnya, bagaimana kita harus menempatkan rumput kering itu pada posisi yang pas. (*Sesunggguhnya pengandaian rumput kering itu merupakan kritik tajam Pak Natsir pada kondisi umat saat itu*. Vet. dari Red).

Kita cenderung mudah retak karena teman kita yang kita harapkan untuk bekerjasama berbeda jalan atau berbeda ijtihad. Lantas kita simpulkan bahwa ke-Islaman mereka kurang dan lain sebagainya. Pak Natsir mengatakan bahwa dalam suatu perjalanan yang jauh, tidak semua orang dapat sampai ke garis finish. Ada yang baru seperempat jalan lututnya sudah lemah, ada yang sampai setengah jalan dan ada yang mampu mencapai garis akhir. Jadi tergantung kekuatan masing-masing dan ijtihad mereka harus dihormati.

Jangan sampai kita saling menyalahkan. Kalau ada teman kita yang memilih aktif di Golkar atau parpol atau di organisasi lain tidak berarti bahwa mereka tidak lagi berkhidmat pada Islam. Tetap saja mereka berkhidmat beda-beda. Yang menarik bagi saya adalah jalan pikiran Pak Natsir: Jika rumput

kerring saja harus dimanfaatkan, apalagi teman-teman yang sekedar berbeda pendapat.

Sikap Demokratik dan Beda Pendapat

Dalam pandangan saya, Mohammad Natsir adalah contoh seorang demokrat *par excellence*. Tidak saja seperti pendapat Herbert Feith bahwa Natsir adalah demokrat dan administrator atau "problem-solver" dalam masalah-masalah kenegaraan seperti halnya Mohammad Hatta dan Syahrir, tetapi sikap demokratik Pak Natsir itu tercermin dalam kehidupan sehari-harinya.

Ia tidak membeda-bedakan siapapun tamunya. Di usia yang semakin senja sekarang, tamu-tamunya tetap saja banyak dan tetap saja dilayani. Ia nampaknya sabar dan tahan mendengar persoalan-persoalan dan berbagai keluhan umat di bawah. Dalam hal ini nampaknya ada persamaan dengan salah seorang sahabatnya dulu, almarhum Buya Hamka. Di kantor dewan da'wah Jakarta, saya pernah bertemu dengan tamu Pak Natsir dari suatu desa pelosok di Jawa Timur. Saya heran ketika saya diberi tahu urusannya yang nampak "sepele". Tentang kekurangan biaya untuk menyelesaikan masjid desa yang tidak begitu besar. Tetapi saya segera sadar bahwa yang kelihatan "sepele" itu bagi sang tamu dan umat "grassroots" di desa itu masalah besar dan penting. Dus, tidak ada urusan yang "sepele".

Sikap demokratis Pak Natsir juga kelihatan dalam soal berbeda pendapat. Ia menghargai pendapat-pendapat lain, bahkan yang menentangnya, asal dikemukakan secara ethis.

Katanya ia pernah berbeda pendapat dengan H. Agus Salaim dengan cara yang ethis. Perbedaan pendapat itu kemudian menimbulkan suasana yang segar. Saya sendiri merasa bahwa pendangan saya terhadap persepektif revolusi Iran berlainan dengan pendangan beliau. Tetapi tidak sedikitpun hal ini mengganggu. Kapan saja saya bertemu Pak Natsir di kantor Dewan Da'wah, saya dapat tukar pikiran mengenai berbagai masalah da'wah di Indonesia dengan lencar dan banyak menfaat.

Kesan saya, sahabat-sahabat seperti Mohammad Roem dan Sukiman Wiryosandjoyo yang sudah mendahuluinya, yang sudah di hadiahi bintang mahaputra oleh pemerintah orde baru, juga merupakan demokrat-demokrat terkemuka. Kelihatannya angkatan mereka memang cukup berhasil dalam menciptakan iklim demokratik tidak saja di antara mereka sendiri, tetapi juga dengan tokoh-tokoh rakyat yang lain. Bahwa Pak Natsir juga berteman dengan Pak Kasimo (tokoh Katholik) almarhum Pak Wilopo (tokoh nasional dari PNI) almarhum Syahrir dan lain-lainnya kiranya sudah menjadi catatan sejarah yang penting bagi generasi berikutnya sebagai pelajaran bahwa untuk membangun bangsa Insonesia memang diperlukan kerjasama demokratik dari seluruh tokoh dan bangsa Indonesia.

Kantor Masuk Rumah

Dalam usianya yang mendekati sepuluh windu, Pak Natsir yang seringkali terganggu kesehatannya dilarang dokter untuk datang ke kantor. Ia perlu

istirahat penuh dan mengurangi kegiatan-kegiatan kantornya. Akan tetapi larangan dokter ini kelihatannya tidak begitu efektif. Kegiatan-kegiatan kantor lantas melakukan invasi ke rumah Pak Natsir. Tamu-tamu dari berbagai daerah tetap saja mengalir. Sampai-sampai ummi, panggilan akrab Bu Natsir, kewalahan. Pengumuman dokter yang yang dipasang di pintu rumah bahwa Pak Natsir tidak boleh menerima tamu, jarang yang diindahkan oleh mereka yang datang dari jauh sekedar bersalaman dan bersilaturahmi.

Sambil berkelakar Pak Natsir pernah mengatakan bahwa beliau memang sudah tidak lagi pergi ke kantor, tetapi kantorlah yang kemudian masuk rumah. Nampaknya bagi seorang tokoh seperti beliau, tidak ada kata "pensiun" dalam kamus kehidupannya untuk berkhidmat pada agamanya, pada bangsanya dan pada negaranya. Di usia 78 tahun Pak Natsir masih terus menjadi salah satu referensi pokok kaum muslimin di Indonesia dan di dunia mereka. Bahkan ada seorang menteri dari negara tetangga yang "nyelonong" ke rumah beliau pada jam 11 malam, setelah acara-acara resminya selesai, sekedar untuk bersilaturahmi. Daya tarik Natsir tetap saja kuat walaupun sudah tidak lagi mempunyai jabatan-jabatan formal. Letak daya tarik itu pernah diungkapkan oleh almarhum Muhammad Roem ketika mengatakan, Mohammad Natsir adalah nurani umat.

BAB III

Dua Langkah Reformasi

Krisis moneter dan ekonomi yang tengah melanda Indonesia merupakan sinyal awal berlangsungnya proses perubahan dan transisi di masa mendatang. Pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukkan transisi pada periode kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif atau hampir negatif, tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Salah satu tugas bersama yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh adalah bagaimana supaya kita dapat keluar dari situasi krisis dan gejolak ekonomi dengan selamat. Supaya krisis dan perubahan yang sedang berlangsung tak

mengarah pada kemerosotan politik dan ekonomi lebih jauh, kita memerlukan serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan jangka pendek dimaksudkan untuk mengelola dan mengatasi krisis yang sedang terjadi, sedangkan kebijakan dan tindakan jangka panjang dimaksudkan sebagai usaha memantapkan kehadiran dan posisi Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional yang adil dann beradab. Dengan demikian, ada dua langkah reformasi yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

A. Jangka Pendek

Pada intinya, langkah pertama reformasi, yaitu reformasi jangka pendek, adalah penanganan krisis ekonomi.

Jika diperhatikan, sebagian besar dari jalan keluar yang sekarang dilaksanakan atas desakan IMF sudah sering disuarakan para pengamat ekonomi kita. Soal monopoli, termasuk monopoli Bulog, kurangnya transportasi anggaran, proyek mobil nasional, berbagai jenis kolusi, korupsi, dan lain-lain, sebenarnya merupakan lagu lama. Tetapi, berbagai kritik konstruktif tersebut cenderung dianggap sebagai angin lalu atau teriakan yang tidak perlu diperhatikan.

Hal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa salah satu persoalan kehidupan ekonomi kita adalah kurang responsifnya pemerintah dalam menanggapi opini dan masukan rasional dari masyarakat dan kemudian menerjemahkannya ke dalam program-program reformasi. Pada gilirannya, hal ini telah mempengaruhi fleksibilitas perekonomian Indonesia

dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

Mengapa pejabat-pejabat pemerintahan yang secara nominal menguasai organisasi dan aparat negara merasa kesulitan atau merasa tidak mungkin mengadakan reformasi, padahal mereka memiliki kekuasaan untuk melakukanya?

Untuk mengetahui jawabannya, kita dapat menggunakan argumen psikologi politik. Para pejabat negara, seperti orang pada umumnya, tidak mudah mengakui kesalahan dan kekeliruan kebijakan yang meeka lakukanselama ini. Kadang-kadang mengaku salah sama artinya dengan membunuh secara politik. Dalam hal ini, menjalankan reformasi dipandang sebagai suatu tindakan mengaku salah yang memalukan. Karenanya, reformasi sedapat mungkin dihindari.

Dalam konteks inilah, IMF memiliki keuntungan komparatif dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, IMF mampu memainkan peran sebagai kambing hitam internasional. Para pejabat negara yang salama ini enggan mengadakan reformasi dapat menisbatkan tindakan-tindakan drastis itu pada IMF. Bila program perbaikan ekonomi tersebut gagal, maka pejabat-pejabat negara dapat menimpakan kesalahan kepada IMF. Dengan kata lain, sebagai kambing hitam, IMF dapat menghapus rintangan psikologi terhadap perubahan dan reformasi ekonomi.

Tugas mendesak dala jagka pendek adalah pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka memulihkan rupiah dan kepercayaan para

investor terhadap Indonesia. Perekonomian Indonesia sudah menjadi bagaian dari arus perekonomian dan pasar global. Untuk itu, masyarakat internasional perlu diyakinkan bahwa Indonesia memang bersungguh-sungguh dalam mengadakan reformasi ekonomi.

Selain itu, penyediaan keperluan-keperluan pokok dengan harga terjangkau masyarakat luas perlu mendapat prioritas. Di masyarakat manapun, persoalan penyediaan keburuhan pokok dengan harga terjangkau adalah soal politik yang sangat peka. Kita semua perlu mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak adil yang kita *fair* dalam krisis sekarang. Anggota-anggota masyarakat yang paling rentan dan rapuh terhadap berbagai dampak krisis sekarang ialah mereka yang paling sedikit menikmati hasil-hasil pembangunan ketika ekonomi Indonesia tumbuh.

Pengalaman bangsa-bangsa lain yang pernah m endapat *food riots* menunjukkan bahwa gejolak-gejolak sosial mudah sekali dipicu oleh kelangkaan dan tingginya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Ketika pemerintahan orde baru muncul, persoalan ini merupakan bagian dari Tritura yang terkenal. Lebih dari tiga dasawarsa kemudian, setelah melalui proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adalah ironis sekali apabila tuntunan ini seolah-olah bangkit kembali dari kuburnya.

Tugas mendesak lainnya adalah mengehntikan kolusi, korupsi, dan obskurantisme dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Ini juga mengisyaratkan birokrasi pemerintahan yang bersih (clean goverment). Sebab,

hal ini merupakan salah satu rintangan bagi kemampuan menghadapi tantangan di bidang ekonomi dan politik.

Kehidupan perekonomian yang normal dan kapitalisme yang rasional, yaitu yang berbeda dari kapitalisme politik atau *crony capitalism,* hanya dapat berfungsi dalam konteks kelembagaan dan kebijakan yang rasional. Begitu pula, pemerintahan yang korup, tidak adil, dan otoriter bukan kondisi yang kondusif bagi kinerja ekonomi yang sehat. Bahkan, pemerin-tahan yang tidak bersih akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi yang amat diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah reformasi.

Yang diperlukan masyarakat Indonesia adalah, bagaimana mengawasi pelaksanaan reformasi jangka pendek supaya membuahkan hasil secepat mungkin dan krisis tidak semakin berlarut-larut. Ketiadaan kehendak politik juga berbahaya karena mampu menyabot implementasi program-program perbaikan ekonomi. Karenanya, perlu pengawasan terhadap program penyehatan ekonomi IMF, misalnya juga perlu mendapat perhatian masyarakat luas.

B. Jangka Panjang

Dalam situasi krisis politik dan perekonomian sekarang, penanganan dan pengelolaan yang bersifat jangka pendek memang merupakan keharuisan. Akan tetapi, kesibukan melaksanakan reformasi jangka pendek jangan sampai mengabaikan reformasi jangka panjang.

1. Pendidikan

Salah satu agenda reformasi jangka panjang ada-lah pendidikan warga negara atau pengembangan sumber daya manusia. Investasi di bidang sarana-sarana publik, seperti pendidikan, penelitian, dan infrastruktur adalah bekal penting dalam menghada-pi krisis dan gejolak lain di masa mendatang. Sebab, pendidikan dalam arti luas, yang mencakup riset dan pengembangan, pembinaan kemampuan melakukan inovasi, kemampuan teknologi, dan industrialisasi adalah unsur mutlak dalam mengantisipasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam jangka panjang, pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia juga berkait dengan beberapa agenda reformasi lainnya, seperti profesionalisme, kemandirian teknologi, dan pengembangan industri manufaktur. Secara singkat, agenda-agenda ini akan dipaparkan sebagai berikut.

Inveasti di bidang pendidikan, keterampilan dan wirausaha penting karena merupakan basis mobilitas ke atas yang didasarkan atas merit. Keutamaan dan keunggulan, bukan koneksi, nepotisme dan mekanisme-mekanisme siluman lainnya.

Manusia-manusia Indoensia yang *refined* dan berpendidikan tinggi adalah basis sosial kelas menengah yang dapat menjiwai nilai-nilai kapitalisme tulen dan rasional, bukan kapitalisme *simsalabim*. Warga negara yang berpendidikan dan kompetensinya, ia juga lebih mampu memahami lingkungannya dan peluang meraih keuntungan yang ditawarkan teknolgi canggih.

2. Teknologi

Kemandirian di bidang teknologi adalah agenda reformasi jangka panjang lainnnya. Investasi di bidang pendidikan dalam arti luas merupakan bekal kemandirian bangsa Indonesia di bidang teknologi, mulai dari robotika, elektronika, otomotif sampai kedirgantaraan. Kemandirian teknologi ini tentu amat bernilai dalam jangka menengah dan panjang.

3. Politik

Agenda reformasi lainnya adalah pembinaan mekanisme suksesi politik dan kepemimpinan nasional dalam arti luas. Negara orde baru, seperti diketahui, sangat penting dalam rangka pembangunan nasional terutama ekonomi. Selaras dengan ini, dimensi partisipasi politik beserta lembaga-lembaganya diharuskan "menyesuakan diri" terhadap tujuan menciptakan stabilitas dan menjalankan roda pembangunan ekonomi.

Dengan kata lain, Indonesia sebagaimana halnya banyak negara berkembang lainnya, dapat dipandang sebagai —meminjam istilah seorang ilmuwan politik— "negara tiga dimensi". Ketiga dimensi tersebut adalah keamanan, pembangunan dan partisipasi. Dilihat dari tiga dimensi tersebut, ored baru ada kecenderungan kuat menetapkan keamanan sebagai nilai utama, disusul pembangunan, dan akhirnya partisipasi, khususnya partisipasi dalam menerapkan program dan kebijakan pembangunan pemerintah.

Selaras dengan kecenderungan itu, angakatan bersenjata sebagai institusi utama keamanan, menjadi sumber utama pemimpin dan calon pemimpin

nasional Indonesia. Setelah itu, tempat pembibitan dan penggodokan pemimpin Indonesia adalah birokrasi pemerintah dan badan-badan umum milik negara sebagai "kerangka baja" yang merumuskan dan menjalankan pembangunan selama ini. Karenanya, dilihat dari salah satu aspek suksesi, yaitu menyangkut siapa yang akan dipilih, sistem politik kita dihadapkan pada persoalan lemahnya mekanisme pembibitan kepemimpinan nasional dalam masyakat sipil.

Dilihat dari tiga dimensi keamanan-pembangunan-partisipasi, dimensi partisipasi cenderung dianaktirikan dan terfokus pada partisipasi dalam menerapkan kebijakan dan program pemerintah. Peranserta rakyat dalam proses pembuatan keputusan tidak banyak artinya. Selaras dengan ini, lembaga-lembaga partisipasi dan perwakilan politik, milsanya partai politik, sering diintervensi pemerintah.

Terkait dengan hali ini adalah lemahnya basis sosial partai politik. Akibatnya, lembaga-lembaga partisipasi politik menjadi impoten atau tidak efektif, dalam kondisi ini, kita tidak memberi kesempatan pada lembaga-lembaga partisipasi politik seperti partai untuk menjadi sumber pemimpin nasional yang dapat diandalkan.

Golongan Karya pun dihadapkan kepada persoalan-persoalan mendasar yang sama. Karena tak terlatuih sebagai lembaga yang mandiri dan otonom, yang memadai sebagai tempat menggodok pemimpin nasional. Yang bisa dilakukan Golongan Karya adalah mengikuti prosedur dan petunjuk presiden.

Dengan demikian, reformasi di bidang perwakilan merupakan landasan bagi partisipasi politik sebagai manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia. Selain itu, reformasi di bidang perwakilan juga melandasi beberapa agenda reformasi politik Indonesia lainnya, yaitu rekrutmen dan suksesi politik yang terbuka dan konstitusional.

Dengan demikian, reformasi di bidang perwakilan merupakan landasan bagi partisipasi politik sebagai manifestasi kedaulatan rakyat Indonesia. Selain itu, reformasi di bidang perwakilan juga melandasi beberapa agenda reformasi politik Indonesia lainnya, yaitu rekrutmen dan suksesi politik yang terbuka dan konstitusional.

4. Demokrasi

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa kedua langkah reformasi tersebut, yaitu langkah jangka pendek dan jangka panjang, bermuara kepada keniscayaan yang lebih luas, yaitu demokratisasi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.

Sejarah demokratisasi menunjukkan bahwa demokratisasi adalah proses yang sering menelan waktu lama dan ditandai dengan negosiasi dan tawar-menawar yang melibatkan berbagai pelaku politik dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada *instant democracy*.

Akan tetapi, demokratisasi bukan pula proses yang terjadi dengan sendirinya dalam kevakuman. Demokratisasi adalah proses yang harus dimulai dan diupayakan agar berlangsung dan bertahan. Jika kita menyiapkan dan mengawalnya dengan hati-hati, demokratisasi tidak harus terperosok ke dalam anarki

dan revolusi penuh kekerasan. Dalam konteks inilah jalan demokrasi merupakan pilihan yang realistis masyarakat Indonesia.

(Tulisan ini diringkas dari pidato penerimaan "UUI Award '97)

Menghindari Revolusi

Dalam arti luas, revolusi merupakan perubahan radikal menyangkut pemerintah dan masyarakat suatu negara dengan mengagungkan cara-cara kekerasan. Di dalam ilmu sosial (keculi yang ke-kemarxis-marxis-an) revolusi tidak banyak dibahas, oleh karena pada hakekatnya terjadinya revolusi adalah akibat dari sistim sosial yang tidak berfungsi, alias disfungsional. Sedangkan ilmu sosial mempelajari keteraturan dan keafegan atau "regularities" dari sistim sosial yang ada. Namun demikian dalam sejarah kita sering menyaksikan ledakan revolusi dan seolah-oleh revolusi tidak bisa dihindarkan. Kadang-kadang revolusi bisa berhasil, tetapi juga sering mengalami kegagalan. Kalau berhasil – dus masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik bisa jadi kenyataan – ongkos revolusi yang

biasanya berwujud darah dan jiwa manusia, walaupun kelewat mahal, masih bisa dianggap memadai. Tetapi kalau gagal, tidak akan bisa dilihat lagi yang mana ongkos dan mana keuntungan revolusi, karena kegagalan revolusi berarti kekacauan dan penderitaan semesta. Contoh kegagalan yang paling tragis akhir-akhir ini adalah revolusi "merah" Polpot di Kampuchea yang kita semuanya sudah tahu.

Tetapi mengapa terjadi revolusi? Untuk menjawab pertanyaan ini baiklah kita buat abstraksi tentang suatu masyarakat yang mengalami proses sosial ke arah revolusi. Pada umumnya masyarakat yang "vulnerable" terhadap revolusi bukanlah masyarakat yang masih primitif-terbelakang dan juga bukan masyarakat industri-maju. Biasanya masyarakat yang diancam revolusi (selanjutnya kita namakan masyarakat X) termasuk dalam kategori negara berkembang (istilah salah kaprahnya: *develoing countries)* karena disinilah bibit revolusi bisa cepat menjalar seperti epidemi. Sarjana-sarjana seperti Alexis de Tocqueville, Crane Brinton sampai Samuel Huntington dan Leonard Binder tidak percaya bahwa revolusi bisa terjadi di masyarakat masih primitif di mana rakyatnya terlalu bodoh dan bersifat "nerimo", sebaliknya kemungkinan meletusnya revolusi di negara yang sudah meju industri dan ekonominya hampir mustahil, karena rakyatnya relatif sudah puas dengan pemenuhan hidupnya. Jadi pada masyarakat pertama api revolusi tidak mungkin disulut, pada masyarakat kedua api itu sudah padam.

Dekorasi-Demokrasi

Biasanya masyarakat X yang diancam revolusi mengindap semacam *schizophrenic*, dalam sistim sosialnya, gara-gara hakekat politiknya bertentang dengan hakekat ekonominya. Dalam bidang politik dianut otoriterisme secara konsekwen di mana hanya ada suatu partai tunggal milik pemerintah. Ataupun kalau ada lebih dari satu, yang lainya tidak memiliki kebebasan politik dalam arti sewajarnya. Fungsi dari partai-partai selain partai yang berkuasa hanyalah sebagai dekorasi demokrasi. Jadi secara formal negara X adalah demokrasi, tetapi substansiil adalah otoriter. Akan tetapi dalam bidang ekonomi masyarakat X merupakan, sadar atau tidak, *free enterprise* dan liberalisme walaupun istilah-istilah seperti ini tidak pernah bisa dijumpai dalam kamus pimpinan negara X tersebut. Otoriterisme dalam bidang politik yang bertolak punggung dengan liberalisme ekonomi inilah yang merupakan sumber penyelewengan politik dan ekonomi dalam masyarakat.

Liberalisme ekonomi mendorong mereka yang punya kesempatan untuk *self-aggrandizement* mencapai tujuannya secara awut-awutan, berlakulah kemudian hukum rimba, *homo homoni lupus*, manusia yang satu jadi srigala bagi manusia lainnya dalam masyarakat. Pengusaha-pengusaha kecil gulung tikar, inisiatif untuk berentrepreneurship mati karena uang sudah diakumulasi oleh para "pengusaha" besar. Pada galibnya pengusaha besar ini hanya menjadi tukang tadah komoditi import dengan kapital berupa kredit negara. Perlu diingat, kredit negara ini ialah uang rakyat. Paralel dengan liberalisme ekonomi ini adalah

meningkatnya korupsi di kalangan pejabat karena mereka juga ingin kaya dengan jalan menerobos.

Andaikata liberalisme ekonomi ini diimbangi dengan liberalisme politik, paling tidak partai-partai atau kelompok politik lain dan media massa akan bisa melakukan kontrol sosialnya sehingga bisa meminimalisir kebocoran negara dan kelaliman para pejabat. Tetapi sayangnya dalam otoriterisme politik partai-partai sudah dikebiri, kelompok-kelompok politik yang ada kejangkitan oportunisme dan sebagian besar media massa harus menyanyikan sendung penguasa. Akibatnya adalah bahwa masyarakat – negara tanpa kontrol sosial yang efektif akan menggelondong ke jurang kebangkrutan.

Disharmoni antara otoriterisme politik dan liberalisme ekonomi ini melahirkan berbagai fenomena negatif, antara lain, munculnya *nuveaux diches* atau OKB, orang kaya baru, dan juga nouveaux pauvres atau OMB, orang melarat baru. Yang pertama terdiri dari para pejabat sipil dan militer, yang dengan pengaruh dan fasilitasnya bisa mengeruk kekayaan negara dengan bermacam cara, plus pengusaha-pengusaha amatir yang berkoalisi dengan parasit-parasit ekonomi. Yang kedua, OMB, terdiri dari kaum buruh, pegawai rendahan, prajurit, petani kecil, nelayan, para tukang dan sebagainya. Mereka sudah melarat, tetapi lebih melarat lagi karena penghasilan nominalnya hanya bisa untuk menyambung hidup persis pada garis kemiskinan atau malah di bawah garis kemiskinan. Kenyataan seperti ini dalam jangka panjang akan menyebabkan antagonoisme si kaya dan si miskin menjadi semakin tajam.

Sementara itu hampir bisa dipastikan bahwa liberalisme ekonomi tanpa demokrasi politik akan membawa kegagalan ekonomi. Manifestasi kegagalan ekonomi yang paling jelas adalah krisis finansial. Wajah ekonomi semakin buruk lagi ditambah dengan *insensitifitas* (kebebalan) pemerintah terhadap kenyataan-kenyataan ekonomi sehingga program ekonomi pemerintah biasanya hanya bagus di atas kertas tanpa bisa dilaksanakan karena perhitungan yang serba tidak riil. Karena liberalisme ekonomi dalam masyarakat X bersifat counter-produktif, bahkan destruktif, kaum intelegensia lantas mengalami alienasi. Mereka tidak bisa menyuarakan usul-usul reformasinya, apalagi memberikan kritik kepada penguasa, karena pasti akan menghadapi tembok otoriter-politik yang keras. "alienated intelligentsia" ini biasanya lantas memproduksi fikiran-fikiran yang radikal. Gagasan radikal sering bisa menggerakkan kegiatan revolusioner. Tidak jarang gagasan radikal ini kemudian berkembang tidak saja di kalangan kaum terpelajar, melainkan juga di kalangan rakyat banyak sehingga terjadilah proses pembentukan mental revolusioner secara obsesif.

Mentalitas revolusioner ini akan berjangkit terutama di kota-kota besar di mana angka pengangguran cukup tinggi. Dan sebagai akibat urbanisasi serta mobilitas sosial baik horisontal maupun vertikal, banyak manusia kota menjadi "rootless" dan "anxious". Mudah kita maklumi bahwa kelompok masyarakat yang merasa kehilangan akar dan selalu cemas dan mereka yang menganggur cepat sekali meng-absorbir gagasan-gagasan radikal. Di

samping itu "pembangunan" dalam masyarakat X karena tanpa kontrol sosial akhirnya menjadi pembangunan semu dan menguntungkan hanya beberapa kelompok kecil tertentu. Pengangguran tidak bisa disedot dan kemiskinan semakin meluas bagi sebagain besar rakyat. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai *alienasi, anomie,* dan *sense of deprivation* atau perasaan tak berguna pada rakyat kecil.

Dalam keadaan seperti ini rakyat seakan-akan tinggal menunggu tokoh-tokoh revolusi sebagai akselerator dan memimpin rakyat mendobrak norma-norma dan orde sosial yang ada. Walaupun demikian pecah atau tidaknya suatu revolusi sangat tergantung pada respons atau jabatan kaum elite terhadap gejala-gejala kebangkrutan sistim sosial yang berlaku. Kalau elite sosial tidak mampu mengurangi beban penderitaan rakyatnya, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan semakain jauh dari rakyat, kemungkinan besar revolusi akan timbul. Apalagi kalau si-elite lantas menunjukkan "kekeras-kepalaan" (intransigence) dan menjawab kritik apa saja dengan brutalitas seperti dilakukan Shah Iran atau Somosa di Nikaragua, maka bisa dipastikan bahwa revolusi itu akan meledak. Adapun intensitas revolusi kebanyakan berbanding seimbang dengan intensitas penderitaan rakyat kecil.

Secara ringkas bisa kita katakan bahwa faktor-faktor pokok penyebab revolusi adalah *pertama,* adanya kontradiksi antara hakekat ekonomi dan hakekat masyarakat; *kedua,* jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin semakin curam; *ketiga,* krisis

finansial yang berlarut-larut; *keempat,* alienasi kaum inteligensia semakin mendalam; dan *kelima,* semuanya ini menghadapi elite yang sombong, keras kepala dan brutal. Abstraksi masyarakat X di atas kurang lebih dapat menggambarkan keadaan beberapa negara di Amerika Latin dan Asia, misalnya saja filipina. Negara kita jelas belum seperti masyarakat X di atas, kendati di sana-sini mungkin ada kemiripan, yang perlu kita garis bawahi ialah, bahwa revolusi itu pada prinsipnya bisa di hindarkan, "revolution is not inevitable", caranya ?

Hilangkan Kontradiksi

Kontradiksi ekonomi dan politik harus di akhiri kalau liberalisme ekonomi yang diakui dalam praktek (slogan bisa lain!), maka bidang politik harus demokratis. Partai-partai perlu diberi kebebasan politik sewajarnya, fungsi parlemen dijalankan, kebebasan pers diperbolehkan, kebebasan mimbar di kampus, etc. Dengan demikian letupan-letupan kecil berupa keritik dan protes rasional bisa dikatalisir. *Mekanisme checks and balances* bisa menggelinding dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa dapat dikoreksi. Hal ini lebih sehat daripada letupan-letupan itu *latent* membesar tanpa "outlet" dan akhirnya meledak jadi revolusi. Liberalisme dan demokrasi penuh, boleh saja mengambil politik yang rada otoriter, tetapi ekonomi harus bercorak egalitarian dan sosial. Namun syarat mutlaknya negara harus dipimpin oleh seorang "strong man" yang "benevolent" dan "enlightened" dan benar-benar memahami kehidupan rakyat. Selain

menghilangkan kontradiksi ekonomi dan politik yang menyebabkan sistim sosial jadi disfungsional, faktor-faktor penyebab revolusi lainya tersebut di atas harus dilenyapkan, setidak-tidaknya diminimalisir. Dan tugas ini sudah semestinya ada dipundak kaum elite atau para penguasa.

Akhirnya, ada gambaran yang tajam sekali dalam Al-Qur'an, bagaiman suatu elite yang nampaknya kotor dan akhirnya tumbang karena meremehkan penderitaan rakyat banyak. Fir'aun, Qarun dan Haman adalah tiga serangkai yang masing-masing mewakili elite politik militer, elite ekonomi dan elite tehnokratik. Gabungan elite ini akhirnya toh, hancur karena tidak peka terhadap nurani rakyat kecil, tidak mau mendengarkan kebenaran dan tidak ingin menegakkan keadilan. Gambaran ini bisa dijadikan pelajaran bangsa mana saja di dunia ini. Pada hakekatnya revolusi di mana saja bisa dihindarkan, asal belum terlalu terlambat. Dan untuk kita di Indonesia, hari masih pagi. Perbaikan masih mungkin.

Gerakan-Gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini ketika terlalu sering mendengar istilah Islam fundamentalis, Islam militan, Islam integrasi, Islam revolusioner dan sebagainya, yang disangkutkan dengan fenomena kebangunan Islam di dunia Muslim yang terbentang dari Indonesia sampai Maroko. Istilah-istilah itu mula-mula muncul secara deras dari berbagai buku dan pers Barat yang pada umumnya khawatir bahwa *Islamic reassertions* yang sejak beberapa waktu terakhir ini tampak jelas di banyak negeri Muslim akan merupakan ancaman

bagi stabilitas politik internasional dan bagi kepentingan Barat. Ini suatu kekhawatiran yang barangkali mudah kita mengerti, mengingat negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, tidak ingin melihat perubahan fundamental terhadap *status quo* konstelasi politik internasional yang ada sejak perang Dunia II, kecuali kalau jelas akan menguntungkan kepentingannya.

Berbagai perkembangan di dunia Muslim memang sangat menarik perhatian akhir-akhir ini. Misalnya aplikasi hukum Islam di Arab Saudi dan Libia yang seringkali membawa ekses karena cara-cara penerapan hukum Islam yang terlalu harfiah dan melepaskan masalah-masalah yang diputuskan dari konteks sosio-kultural dan sosio-ekonominya. Begitu juga dengan gerakan internasional Moamar Khadafi yang tidak saja mencoba mempengaruhi situasi dalam negeri beberapa negara Afrika, tetapi juga beberapa negara di kawasan Asia. Selain itu ada pula keputusan resmi pemerintah Sudan di bawah Presiden Ja'far Numeiri untuk memberlakukan syari'ah Islamiah, dan keputusan yang sama oleh parlemen Mesir di masa Presiden Anwar Sadat; gerakan-gerakan anti-Kemalis di Turki yang mencoba menghapus hasil-hasil sekularisasi Kemal Ataturk; pengumuman Presiden Zia ul-Haq untuk memberlakukan hukum Islam di Pakistan; makin banyaknya mahasiswi yang berkerudung di kampus-kampus besar di dunia Islam, sejak dari Ankara sampai Kualalumpur dan Jakarta; dan yang paling spektakuler adalah eksperimen rakyat Iran untuk mendirikan suatu republik Islam setelah mereka melakukan revolusi pada tahun 1979.

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa fenomena kebangunan Islam – paling tidak secara lahiriah -- adalah suatu gejala yang sesungguhnya kait-berkait dan bahwa kejadian di berbagai negeri Muslim yang dianggap sebagai manifestasi pemunculan kembali nilai-nilai Islam tidaklah berdiri sendiri. Yang tidak kalah menarik adalah kenyataan bahwa semangat kebangunan Islam yang termanifestasikan, misalnya dalam contoh-contoh tadi bukanlah semangat yang hilang setelah satu atau dua tahun, tetapi tampaknya malah meluas, dan dampaknya di masa depan masih sulit untuk diramalkan. Kendati demikian, tulisan ini akan mencoba memahami hakekat kebangunan Islam pada bagian terakhir abad XX ini, membahas beberapa contoh gerakan Islam internasional serta melihat dampak atau pengaruhnya terhadap gerakan Islam di Indonesia.

Islam: Ajaran Revolusioner

Yang membedakan Islam dengan dua agama besar lainya di dunia – Kristen dan Budhisme – adalah sentralisasi dan universalis Islam bagi para pemeluknya. Menurut para pemeluk Kristen, agama yang diajarkan Jesus Kristus adalah universal, tetapi tidak bersifat sentral dalam arti bahwa seluruh dimensi kehidupan manusia Kristiani harus ditumpukan pada ajaran Kristen. Kristen menerima dikotomisasi kehidupan temporal dan kehidupan spiritual berdasarkan doktrin dan praktek Kristiani yang cukup terkenal:"*Rander unto Caecar the things which are Caesar's and unto God the things which are God's*". Sementara itu Budhisme tidak menunjukkan

universalisme. Bagi para pengikut Budha, agama mereka juga dapat menerima dikotomisasi kehidupan dalam sejarah modern memang tidak terdapat contoh usaha pembentukan negara Budhis oleh para penganut Budha.

Namun satu kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah memahami ajaran Islam dengan referensi Kristen atau sebaliknya, memahami Kristen dengan referensi Islam. Doktrin, ajaran-ajaran fundamental dan juga perjalanan sejarah Kristen dan Islam sudah berbeda sejak semula. Islam telah membawa watak revolusioner sejak kelahirannya. Bila revolusi kita artikan sebagai suatu perubahan fundamental, atau rekonstruksi sosial dan moral masyarakat, maka Islam yang dibawa Nabi Muhamad saw. di jazirah Arabia pada abad VII Masehi merupakan suatu revolusi total yang mengubah seluruh dimensi kehidupah manusia saat itu. Tradisi revolusioner Islam itu tampak jelas dan tidak pernah mundur dari panggung sejarah umat manusia, walaupun memang mengalami pasang-surut. Tradisi revolusioner Islam pasti sulit kita pahami jika kita menggunakan kerangka konsepsional agama Kristen dan melihatnya dengan kacamata perjalanan sejarah Kristen.

Beberapa pengamat non Muslim sendiri mengakui perbedaan perjalanan sejarah antara Islam dan Kristen yang pada gilirannya membawa kedua agama ini ke arah yang berlainan.[1] Beberapa tahun setelah kelahirannya, Islam sukses terus menerus. Masa-masa formatif Islam penuh dengan sukses temporal maupun sukses spiritual. Imperium Romawi

dan Imperium Persia bertekuk-lutut di hadapan Islam, dan terbukti Imperium Islam jauh lebih luas dibandingkan dengan imperium Romawi di puncak kejayaannya.

Kesuksesan Islam bersifat komprehensif karena tercakup di dalamnya hampir seluruh segi kehidupan masyarakat, termasuk politik. Keberhasilan politik dan ekonomi kaum muslimin di masa lalu membawa keberhasilan pula dalam pengembangan berbagai cabang ilmu dan teknologi. Keberhasilan komprehensif itu menyebabkan Islam menjadi kreatif dan sangat percaya pada diri sendiri, di samping *power-relationships* dengan Barat pada waktu itu menguntungkan dunia Islam.

Kecemerlangan Islam dan kaum Muslimin sampai jatuhnya Bagdad pada 1258 dan kemunculan kembali kekuatan Islam dengan jatuhnya Konstantinopel pada 1453, oleh kaum Muslimin, selalu ditafsirkan tidak saja sebagai keberhasilan politik, militer, dan ekonomi, tetapi juga keberhasilan agama. Seluruh pencapaian gemilang di berbagai bidang kehidupan umat Islam, baik di zaman Umayyah, Abbasiyah, maupun Imperium Osmaniyah di Turki, selalu dinilai sebagai keberhasilan *intrinsik* dalam iman atau ajaran Islam. Demikian juga ketika Islam mampu secara sangat mengagumkan menyerap berbagai elemen aneka peradaban dari Arabia, Helenisme, budaya semitik, Persia dan India. Kenyataan ini juga dihubungkan dengan keluasan dan keluesan ajaran Islam sekaligus menunjukkan bahwa secara intrinsik ajaran Islam memungkinkan pengambilan unsur-unsur budaya positif dari

manapun datangnya. Dari rangkaian keberhasilan spiritual dan kultural Islam itulah kemudian tercipta suatu citra yang tidak mungkin diganggu gugat bahwa Islam – sebagai agama wahyu (reveale religion) – menuntut para pemeluknya untuk membangun suatu orde sosial dan politik sesuai dengan etik dan moral Qur'an.

Kenyataan sejarah ini sudah tentu sangat kontras berlainan dengan misalnya perjalanan agama Kristen. Sejak lahirnya sampai tiga ratus kemudian, Kristen menjadi kaum lemah dan tertindas di lingkungan romawi yang sudah mapan, teratur dan lengkap dengan hukum, sistem pemerintah dan struktur ekonomi yang sudah mantap. Sudah sejak awalnya, agama Kristen tidak mendorong para penganutnya untuk memperbaharui orde sosial yang mereka hadapi, sehingga berhasil tidaknya suatu orde sosial dan orde politik tidak menjadi soal bagi mereka, karena dianggap sebagai sesuatu yang *ekstrinsik* terhadap iman dan agama Kristen. Bahkan dalam rentangan sejarah yang cukup panjang, Kristen seringkali tampil sebagai suatu agama penderitaan (a *religion of adversity)* dan palang salib itu bahkan pada hakekatnya merupakan suatu simbol penderitaan. Dari kenyataan ini kita dapat mudah memahami, mengapa peradaban Barat berhakekat ganda *(dual nature),* yakni merupakan gabungan dari dua tradisi: *pertama,* tradisi Yunani dan Romawi; dan *kedua,* tradisi Palestina. Kedua tradisi ini tidak pernah terlebur dan sebagai akibatnya terlalu sering berada dalam konflik. Kompartementalisasi kehidupan menjadi profan dan sakral adalah khas Kristiani, sehingga sekularisasi

hampir tidak pernah menjadi masalah dunia Barat. Sudah tentu kita akan gagal memahami Islam bila kita menggunakan kacamata Kristiani, suatu hal yang perlu kita hindarkan bila kita ingin memahami ajaran Islam secara lebih tepat.

Dari pemaparan sangat singkat ini mudah kita maklumi, kenapa dunia Islam dewasa ini – setalah surut sebentar karena kolonialisme dan imperialisme Barat – mulai menunjukkan kegiatannya kembali dengan mencoba memperbaiki situasi internal kaum Muslimin, membentengi masyarakat Islam dari gangguan eksternal dan mencoba merebut kembali kejayaan masa lalu serta merelevansikan ajaran Qur'an dan Sunnah yang pada dasarnya bersifat progresif dan revolusioner itu dalam kehidupan modern mereka. Terutama sekali bila kita ingin bahwa ajaran Islam boleh dikatakan selalu bersifat *integriste,* maka tidak ada yang aneh sedikitpun dalam fenomena kebangkitan Islam yang mengejawantah dalam berbagai wajah, yakni politik budaya, ekonomi dan lain sebagainya sekarang ini. *Cultural selfassertion* umat Islam bukanlah barang baru. Setelah mengalami disorientasi cukup lama dalam penjajahan Barat, proses identifikasi dari kaum Muslimin, terutama di kalangan kaum terpelajarnya, merupakan suatu hal yang sudah semestinya.[2]

Bahkah di masa penjajahan Barat, Islam tidak pernah berhenti menggerakkan para pemeluknya untuk memukul kembali gelombang kolonialisme dan imperialisme. Gerakan-gerakan budaya, pendidikan, ekonomi dan sufi. Di India dikenal Syekh Waliullah dari New Delhi (1703 – 1762) yang setelah runtuhnya

dinasti Moghul yang Muslim itu, mencoba membangkitkan pemahaman Islam secara segar, agar kaum Muslimin India bangun kembali dari degenerasi sufisme dekaden. Usahanya ini terbentur pada kenyataan makin kuatnya Hindu di bagian barat india dan makin menancapnya kuku Inggris di Bengel. Usaha reformasi Waliullah pada gilirannya diteruskan oleh Sayid Ahmad Khan (1817 – 1898) dengan metode yang lebih liberal lewat gerakan Aligarh.

Sementara itu Jamaluddin al-Afghani (1839 – 1897), tokoh terpenting dunia Islam pada pertengahan terakhir abad XIX menjelajahi Iran, India, Mesir dan dunia Arab pada umumnya serta Turki untuk menanamkan kesadaran pada kaum Muslimin, bahwa Islam menyuruh mereka menentang penindasan dan penjajahan. Ajakan agar para petani *(fellhin)* di Mesir tidak saja mencangkul tanahnya tetapi juga mencangkul hati dan dada kaum imperialis adalah tipikal al-Afghani. Hampir bersamaan dengan masa perjuangan al-Afghani, muncul gerakan sanusiah di Libya dan gerakan Mahdi di Sudan. Keduanya merupakan protes keras terhadap kemerosotan internal umat Islam dan tekanan eksternal terhadap umat yang dilakukan Barat. Di Indonesia lahir Sarekat Islam (1911) dan Muhamadiyyah (1912) yang masing-masing menitikberatkan pada bidang ekonomi, politik dan pendidikan. Di Mesir pada tahun 1928 lahir gerakan "Al-Ikhwan al-Muslimin", yang didirikan oleh Hasan al-Banna, yang meyakini bahwa Islam adalah agama, budaya, moral, ilmu, politik, ekonomi dan militer. Demikian juga di Pakistan berdiri Jamaat Islami di

bawah pimpinan Abul'ala al-Maududi, seorang reformis Islam yang mempunyai ideologi yang mirip dengan Al-Banna. Gerakan-gerakan Islam itu memang bersifat lokal dan muncul karena pengaruh faktor-faktor ekonomi, politik, historis dan budaya tetapi masing-masing mengikuti pola yang pada dasarnya sama, yakni keinginan untuk melihat kebangunan Islam (dalam arti kebangkitan ajarannya dan penciptaan orde sosial yang sesuai dengan preskripsi Islam), perbaikan kehidupan masyarakat Islam dan penolakan terhadap unsur-unsur destruktif dari luar *(eksternal encroachment)*.

Yang tidak boleh dilupakan dalam membicarakan gerakan Islam di dunia Muslim adalah sikap *reserved* mereka terhadap Barat akibat pengalaman traumatik kaum Muslimin selama masa penjajahan. Al-Ikhwan al-Muslimun misalnya, adalah contoh yang cukup spektakuler. Salah satu motivasi kelahirannya adalah untuk menyadarkan bangsa Mesir tentang kesewenang-wenangan bangsa Inggris atas Mesir seperti diperhatikan oleh serdadu-serdadu yang berkeliaran di Islamailia di kawasan terusan Suez. Di samping itu maksud kehadiran al-Ikhwan adalah untuk menerapkan Islam dalam kehidupan kaum Muslimin secara *kulli la yatajazza* yakni secara total tanpa mengalami kompartementalisasi, antara kehidupan yang immanen dan yang transendental, atau antara yang temporal dan yang spiritual. Dalam sejarah perjuangan al-Ikhwan terdapat satu benang merah yang cukup jelas, yaitu sikap yang tidak mengenal kompromi dengan Inggris. Malah diantara aktivis al-Ikhwan ada yang kejangkitan semacam

xenophobia, suatu ekses yang dapat dipahami dalam konteks penindasan Inggris dan Mesir.

Demikian juga sikap tegas dan anti-kompromi terhadap Barat diperlihatkan oleh revolusi Islam Iran. Sebutan *great satan* atau setan besar bagi Amerika oleh Imam Khomeini dan pengikut-pengikutnya menunjukkan betapa mereka bersikap sangat peka dan sadar pada apa yang telah dilakukan Amerika di Iran di zaman Syah Mohammad Pahlevi. Kemiripan antara al-Ikhwan yang Sunni di Mesir dan "gerakan" Islam Syi'ah di bawah Khomeini di Iran tidak berhenti pada permusuhan terhadap Barat saja – atau lebih tepat permusuhan terhadap kepentingan Barat di dunia Islam -, tetapi yang lebih fundamental adalah bahwa keduanya mencoba menerapkan ajaran Islam secara komprehensif dan integral untuk seluruh persoalan masyarakat di zaman modern. Bagi keduanya Islam adalah *raison d'etre* seluruh kegiatan yang mereka lakukan.

Sudah tentu banyak sekali gerakan Islam internasional yang tumbuh di dunia Muslim, tetapi tampaknya yang akan mempunyai pengaruh meluas di masa depan adalah Islam syi'ah yang berhasil membuat revolusi di Iran pada 1979 dan al-Ikhwan yang akan terus mempunyai pengaruh sangat kuat di dunia sunni. Islam syi'ah di Iran – setelah berhasil menguasai negara Iran – jelas akan berposisi lebih kuat dalam mengembangkan ideologinya di panggung internasional. Sedangkan al-Ikhwan, walaupun belum pernah berhasil menguasai suatu negarapun di dunia Arab, akan terus mempunyai pengaruh besar di Mesir, Sudan, Jordan, Suriah dan negara-negara

teluk dan bahkan di negeri-negeri Muslim non Arab. Karena itu kita hanya membahas al-Ikhwan dan revolusi Islam Iran dalam tulisan ini.

Al-Ikhwan Al-Muslimun

Al-Ikhwan yang berdiri pada 1928 di Mesir merupakan suatu gerakan massa terbesar di dunia Arab. Dampak dan pengaruh internasionalnya di dunia Muslim sunni tidak dapat disamai oleh gerakan Islam lainya, seperti misalnya Jama'ati Islami di Pakistan. Mereka yang tertarik menjadi anggota al-Ikhwan berasal dari hampir semua lapisan masyarakat, termasuk buruh, petani di pedesaan dan kelas menengah serta kaum terpelajar. Yang menarik dari al-Ikhwan adalah bahwa sebagai gerakan massa, sebagian besar pemimpinnya adalah kaum intelektual dan bukannya ulama dari al-Azhar.

Mula-mula gerakan ini menekankan pentingnya pembangunan sosial, pendidikan dan moral kaum Muslimin, jadi merupakan suatu usaha *reform* yang sudah lama dirintis tokoh-tokoh seperti al-Afghani, Mohammad Abduh dan Rasyid Ridla, Tetapi sistem organisasi yang diterapkan al-Banna demikian praktis dan modern sehingga al-Ikhwan menjadi tidak saja gerakan sosial dan pendidikan, tetapi juga kekuatan sosial politik yang selalu diperhitungkan baik sebelum maupun sesudah revolusi Mesir 1952.

Penentangannya terhadap Barat pada umumnya tidak menghalangi Ikhwan untuk menggunakan suatu organisasi modern dalam rangka mencapai tujuannya. Tampaknya memang ada

perbedaan besar antara modernisasi dan westernisasi menurut pemahaman para pemimpin Ikhwan. Perumusan Ikhwan terhadap Imperialisme Barat, termasuk gaya hidup Barat *(western lifestyles)* memang jelas, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa gerakan ini anti-modernisasi, mengingat organisasi dan sistem manajemen serta programnya juga bersifat modern. Malahan program-programnya jauh lebih komprehensif dan *down-to-earth* dari pada partai politik yang pernah ada di Mesir. Kegiatan pendidikan sejak dari kursus pemberantasan buta huruf sampai publikasi kitab agama, harian dan majalah, kegiatan ekonomi seperti pendirian pabrik tekstil, kegiatan pelayanan masyarakat seperti pembangunan poliklinik dan juga latihan kemiliteran dilakukan gerakan Islam al-Ikhwan. Karena itu dapat dipahami bila Farouk, Nasser dan Sadat cenderung melihat al-Ikhwan sebagai "negara dalam negara".[3]

Seringkali orang menilai bahwa gerakan Islam yang dicetuskan oleh Hasan al-Banna ini bersifat reaktif-impulsif terhadap proses modernisasi Mesir yang terelakkan. Misalnya diajukan teori bahwa massa awam kaum Muslimin di Mesir mengalami apa yang oleh Max Weber dinamakan *die Entzauberung der Zeit* atau demistifikasi dunia (masa), di mana mereka merasa akan kehilangan dunia lama mereka, yang mereka cintai, ikatan komunitas *(Gemeinschaft)* dan akhirnya agama mereka. Lantas sebagai reaksi terhadap *disenchantment of the world* tadi kaum Muslimin mengadakan gerakan menolak industrialisasi dan modernisasi, yang menurut kebanyakan teoritis Barat akan membawa proses

sekularisasi. Di dalam kenyataannya Ikhwan tidak pernah menganjurkan penolakan pada industrialisasi dan modernisasi pembangunan, *taqaddum*, tetapi justru mengambil ajaran-ajaran Islam yang cukup progresif untuk mengambil kedua hal tersebut. Kita sebaiknya memang tidak perlu terjebak dalam kerangka berpikir Barat yang melihat fenomena sosial, politik dan budaya serta keagamaan non-Barat dengan asumsi dan pengalaman kesejarahan Barat.

Al-Ikhwan al-Muslimun (dalam bahasa Inggris sering disebut *Muslim Brotherhood* dan *Muslim Brethren)*, tumbuh pesat sekali di Mesir. Selama 20 tahun pertama (1928 – 1948), gerakan al-Ikhwan telah memiliki sekitar 2.000 cabang dengan jumlah anggota simpatisan sekitar 500 ribu orang yang mencakup hampir segenap lapisan sosial di Mesir, termasuk dari kalangan angkatan bersenjata.

Di masa Farouk politik Hasan al-Banna dan teman-temannya hampir tidak pernah sejalan dengan politik kerajaan yang selalu berkolusi dengan Inggris dan sangat elitis di mana hak-hak rakyat Mesir sering dikorbankan. Pada akhir 1948, Nuqrasi Pasa, Perdana Menteri andalan Farouk, dibunuh oleh salah seorang militan al-Ikhwan, dan reaksi terhadap pembunuhan ini polisi kerajaan Mesir membunuh al-Banna pada Februari 1949. Pembunuhan al-Banna tampaknya sudah lama direncanakan oleh pihak kerajaan dan Inggris karena eksistensi al-Ikhwan yang berkepanjangan akan mengganggu kolaborasi Farouk dan Inggris. Disamping itu ternyata yang paling disegani kaum zionis dalam perang pembebasan Palestina 1948 Adalah para sukarelawan al-Ikhwan

yang jauh memiliki semangat tempur dan moril lebih tinggi dari pada Nasser dan teman-temannya yang lari dari gelanggang pertempuran menghindari tentara-tentara Israel. Kepergian al-Banna merupakan kehilangan besar bagi Ikhwan, dan jalannya sejarah gerakan massa ini akan lain seandainya al-Banna tidak terlalu cepat meninggalkan arena sejarah Mesir.

Ketika Nasser dan para opsir muda di bawah pimpinan Jendral Najib berhasil merebut kekuasaan Farouk pada 1952, Ikhwan berharap bahwa mereka dapat bekerjasama dengan Nasser untuk menegakkan suatu pemerintahan Islam. Tetapi ternyata bahwa kedua pihak mempunyai pandangan yang jauh berbeda. Bagi Nasser berlaku semboyan: *Ad-dienu Illah wal wathanu lil jamie* (Agama bagi Tuhan dan tanah air bagi semua orang). Slogan politik ini bermaksud memojokkan Ikhwan yang ingin melihat pemerintahan Mesir pasca revolusi 1952 berdasarkan Islam. Akhirnya Nasser membubarkan Ikhwan dengan tuduhan bahwa salah seorang anggotanya melakukan percobaan pembunuhan terhadap kepala negara. Dalih ini sekaligus digunakan Nasser untuk membeslah seluruh kekayaan Ikhwan, menghancurkan seluruh organisasinya, memenjarakan ribuan anggotanya dan melenyapkan sebagian pemimpinnya.

Tetapi kader-kader Ikhwan yang tidak masuk penjara Nasser kemudian menyebar ke berbagai negara Arab, terutama Arab Saudi, Sudan, Jordan, Suriah, Libia, Kuwait dan beberapa negara teluk lainya. Sebagian kader-kadernya bahkan ada yang berpindah ke Eropa. Sementara itu Sayid Qutb –

seorang ideologi Ikhwan – tetap memimpin anggota-anggota Ikhwan di Mesir, walaupun tidak terang-terangan, sampai akhirnya meninggal di tiang gantungan pada tahun 1965.

Gerakan Ikhwan yang mulanya terbatas di Mesir, dewasa ini telah berkembang di berbagai negara Arab. Al-Ikhwan dapat bergerak leluasa di Jordan. Di Sudan tokoh-tokoh Ikhwan banyak menduduki posisi penting dan dapat bekerjasama dengan Numeiry. Di Arab Saudi yang tidak memungkinkan hadirnya suatu partai politik, kehadiran Ikhwan diakui secara resmi. Di Suriah Ikhwan merupakan kekuatan oposisi terbesar terhadap rezim Alawait dan partai Ba'th pimpinan Hafiz Asad. Sesungguhnya dalam ideologi Ikhwan, sebuah monarki tidak memiliki tempat sama sekali. Tetapi tampaknya Jordan dan Saudi dapat menerima kehadirannya, selama Ikhwan tidak menunjukan kegiatan politik yang berbahaya bagi kelangsungan kedua monarki tersebut.

Di Mesir dewasa ini secara resmi tidak ada lagi al-Ikhwan al-Muslimun. Sekalipun demikian eksistensi Ikhwan tetap dirasakan kuat sekali oleh masyarakat Mesir, terutama sejak kekalahan Arab ditangan Israel pada perang 1967. Dalam proses *soulsearching* masyarakat Arab, citra dan prestise Ikhwan melejit karena selama ini hanya Ikhwanlah yang paling lantang dalam mengumandangkan hanya dengan Islam negara-negara Arab dapat bersatu dan mampu mengalahkan Israel. Menurut Ikhwan, sosialisme Arab, nasionalisme *(qaumiyah)* Arab dan berbagai ideologi lainya akan membawa

perpecahan di kalangan Arab. Fenomena yang paling menarik dalam kaitan ini adalah makin kukuhnya gerakan-gerakan Islam di seluruh kampus di Mesir dan bahkan di dunia Muslim pada umumnya.

Kelompok-kelompok Islam yang menamakan dirinya "Jami'ah Islamiah" dan dianggap sebagai penerus perjuangan Ikhwan di Mesir merupakan kekuataan yang sangat rapi dan kohesif dan menguasai hampir seluruh senat mahasiswa di berbagai kampus di Mesir. Sebagai contoh, hasil pemilihan di berbagai fakultas di Universitas Alexandria pada 1978 menunjukkan, bahwa Jam'ah Islamiah merebut 60 kursi dari 60 kursi kepengurusan di fakultas kedokteran, 60 dari 60 di fakultas teknik, 47 dari 48 di fakultas pertanian, 42dari 48 di fakultas farmasi, 43 dari 60 di fakultas ilmu pasti, 44 dari 48 di fakultas hukum. Makin kukuhnya Jami'ah Islamiah di kampus-kampus di Mesir mendorong Anwar Sadat membuat keputusan bahwa seluruh senat mahasiswa harus berada di bawah pengawasan universitas dan kegiatan-kegiatan perkumpulan agama di universitas dinyatakan ilegal.[4]

Para mahasiswa anggota Jami'ah Islamiah itu tertarik pada ideologi Ikhwan terutama lewat buku-buku yang ditulis para ideologi Ikhwan, seperti Sayid Qutb, Dr. Musthafa As-Sibai, Dr. Said Romadlon, Mohammad al-Ghozali, Anwar al-Jundi, Dr. Yusuf Qardhawi, Sayid Sabiq dan lain sebagainya. Tafsir *fi Dhilal al-Qur'an* tulisan Sayid Qutb barangkali juga sebagai salah satu sumber utama yang menghubungkan gagasan keagamaan Ikhwan generasi lalu dengan generasi sekarang. Tafsir Qur'an *Fi Dhilal* barangkali

sekarang ini merupakan bacaan utama puluhan juta angkatan muda Islam di seantero dunia. Kekuatan Ikhwan tampaknya terletak pada ideologinya yang mempunyai cukup daya tarik di dunia Muslim sunni. Jika kita tidak menafsirkan ideologi seperti yang dilakukan kaum marxis – yakni ideologi sebagai produk suatu kelas sosial atau fungsi suatu kepentingan kelas – tetapi menafsirkanya sebagai usaha manusia untuk membuat suatu peta intelektual dan sebagai suatu intensifikasi kebutuhan untuk menciptakan peta moral dan kognitif dunia ini, serta mendorong terjadinya transformasi total masyarakat, maka Ikhwan jelas mempunyai ideologi yang cukup *solid*.[5]

Mereka menamakan ideologi itu sebagai fikra – suatu rangkaian gagasan sosial dan politik yang membimbing langkah perjuangan mereka untuk suatu orde perjuangan sosial dan politik Islam sebagaimana diajarkan dalam Qur'an dan Sunnah. Karena Ikhwan mencoba menjadikan Qur'an sebagai *dustur* atau *platform* paling asasi dalam membuat program kegiatannya, maka para pengamat pada umumnya menyebut Ikhwan sebagai gerakan fundamentalis. Tetapi harus segera dicatat bahwa fundamentalisme ala Ikhwan (andai kata kita terima istilah ini) bukan berarti penolakan terhadap perubahan sosial, namun perubahan sosial *(social change)* tersebut haruslah menuruti nilai-nilai tradisional dan *modes of understanding* tertentu pula. Fundamentalisme Ikhwan menarik kebanyakan lapisan terpelajar Muslim di mana-mana, berhubung kaum terpelajar adalah yang paling sadar dan bangga terhadap warisan-waisan keislamannya.

Keadilan sosial merupakan benang merah paling jelas dalam struktur *fikra* Ikhwan sehingga menjadi tema paling sentral dalam seluruh tulisan para pemikir Ikhwan.[6] Di samping itu hubungan antara nasionalisme dan pan-Islamisme, hakekat negara, penolakan terhadap komunisme, revolusi Islam dan lain sebagainya juga memperoleh pembahasan yang luas dalam kerangka pemikiran tokoh-tokoh Ikhwan. Dewasa ini dan pada masa mendatang, dunia Islam masih harus memantapkan identifikasi dirinya, masih harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan Barat dan Timur yang tidak bersahabat dengan negeri-negeri Muslim, dan juga masih harus bertempur melawan al-ghazwal al-fikr atau invasi intelektual dari dunia non-Muslim. Selama proses ini masih terus dan selama *power-relationships* antara dunia Islam dan Barat serta Timur masih senjang, maka selama itu pula Ikhwan, dalam arti gerakan massa maupun terutama dalam arti ideologi, akan mempunyai pengaruh besar di dunia Islam, dari Indonesia sampai Maroko, dan dari Afrika Tengah sampai Turki.

Islam di Iran Setelah Revolusi

Sampai sekarang sebab-sebab keberhasilan revolusi Islam Iran 1979 bagi sementara orang masih tetap merupakan teka-teki, karena dalam beberapa dasawarsa menjelang revolusi tersebut Iran telah mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang cukup mendasar yang seharusnya berakhir dengan tampilnya suatu kelompok sosial baru yang dilengkapi dengan partai-partai dan ideologi sekular

dan seharusnya ditandai mundurnya kelompok-kelompok tradisional yang menjadikan masjid sebagai kubu utama mereka. Menurut teori sosial tradisional, proses urbanisasi, industrialisasi, perluasan pendidikan modern, pemerataan jaringan komunikasi, serta adanya birokrasi sentral di pusat kekuasaan di Iran seharusnya menciptakan kelas inteligensia dan kelas proletariat dan mengurangi arti penting kelas *bazaar (petit bourgeoisie)* yang berkoalisi dengan kaum ulama.

Tetapi yang terjadi di Iran memang membuktikan betapa asumsi-asumsi ilmu sosial telah keliru. Ternyata modernisasi tidak harus otomatis membawa sekularisasi, dan juga urbanisasi tidak perlu memperkecil peranan kelas-kelas tradisional dan memperkuat kelas-kelas modern seperti kelas inteligensia, kelas proletariat industrial dan kelas birokrat sebagai bagian penting kelas menengah. Pada dasawarsa1940-an dan awal 1950-an rakyat Iran juga pernah bergolak mencoba merubuhkan sistem monarki Pahlevi yang eksploitatif. Yang berada di barisan depan pergolakan memobilisasi massa, terutama dari kelas-kelas yang merasa mengalami deprivasi sosial makan gaji *(salaried middle class).* Inspirator pergolakan sosial-politik pada waktu itu bukanlah Islam, melainkan sosialisme dan nasionalisme sekular. Dari pengalaman Iran, revolusi Islam 1979 tetap merupakan suatu paradoks, karena selain revolusi itu menghancurkan teori konvensional tentang sekularisasi, sekaligus menunjukkan bahwa revolusi yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik itu dapat digerakkan oleh ideologi yang sangat

religius. Terbukti bahwa Islam, jika ditafsirkan sebagai suatu ideologi, dapat memiliki watak progresif-revolusioner.[7]

Sesungguhhnya di samping Khomeini yang menjadi tokoh terkemuka dalam revolusi Iran 1979, ada seorang tokoh lainnya yang berhak memperoleh sebutan sebagai salah satu arsitek revolusi itu, yakni Dr. Ali Syari'ati (1934 – 1977), kaum muda dan terpelajar Iran, terutama yang berada di daerah urban, berhutang budi pada Syari'ati berkat reinterpretasi Islam yang dilakukannya secara radikal. Berbeda dengan para reformis Islam sebelumnya yang banyak dipengaruhi medernisasi gaya Barat dan konstitusionalisme, Syari'ati melakukan reinterpretasi Islam dengan menjadikan suatu ideologi untuk mendorong transformasi sosial dan politik radikal. Beberapa ideologi radikal dapat juga kita temukan di bagian dunia Islam lain, seperti sosialisme Arab yang dicetuskan Nasser di Mesir atau sosialisme Arab partai Ba'ath baik di Suriah maupun di Iraq. Tetapi ideologi-ideologi tersebut tidak berangkat dari Islam, berhubung sekedar mencampur nasionalisme Arab, misalnya pan-Arab, dan perubahan sosial radikal. Bila dibandingkan dengan ideologi-ideologi sekular di dunia Islam, reinterpretasi Islam yang dilakukan Syari'ati berhasil membuahkan suatu ideologi radikal yang bersifat menyeluruh, sehingga ia berhasil menjembatani arus tradisionalis dan arus modernis di Iran. Selain itu rangkaian gagasan sosial dan politik Syari'ati memperoleh legitimasi penuh di

hadapan rakyat Iran, justru karena Islam telah dijadikan rujukan baku atau referensi utama.[8]

Ada beberapa persamaan antara Ali Syari'ati dan para ulama mujtahid di Iran. Keduanya menganggap bahwa Islam selain sebagai suatu agama, juga adalah *weltan schauung* sempurna dan menolak dekadensi Barat. Keduanya memiliki unsur-unsur *millenarian* dan menentang otoritas sekular setiap pemerintahan. Tetapi bagi Syari'ati dan tokoh-tokoh pemikir lainnya seperti Mehdi Bazargan dan Taleghani, Islam tidak boleh ditafsirkan sekedar sebagai kumpulan hukum-hukum Tuhan, karena pada hakekatnya Islam adalah suatu keyakinan revolusioner dan sangat fungsional untuk mengkonsolidasi suatu identitas kultural yang militan. Demikian keberhasilan Syari'ati menawarkan suatu ideologi Islam radikal yang berorientasi pada massa dan menomorsatukan keadilan sosial sehingga pengaruh Marxime di kalangan kaum terpelajar Iran menjadi tergusur dengan sendirinya.

Sudah tentu berkobarnya revolusi Iran 1979 disebabkan pula oleh kondisi obyektif yang ada pada waktu itu, seperti kebencian massa terhadap tirani Syah Pahlevi, berkembangnya korupsi, praktek-praktek penganiayaan oleh aparat-aparat negara *(torture)*, pengaruh Amerika yang sudah kelewat batas, berbagai dampak negatif modernisasi, politik luar negeri dan pembiayaan militer yang terlalu mahal, dan juga taktik syah dalam melancarkan repressi dan liberalisasi secara bergantian. Namun revolusi itu sendiri diletakkan di atas dasar ideologi revolusioner yang bersumber pada Islam Syi'ah. Suatu hal yang sangat menarik dari revolusi Iran adalah

daya tariknya yang luar biasa dengan adanya penggabungan antara keyakinan Islam dan radikalisme sosial. Kombinasi Islam dan radikalisme sosial (bukan ekstremisme sosial!) telah menarik hampir seluruh lapisan masyarakat Iran, terutama Kaum muda di kota-kota besar.

Pengaruh internasional revolusi Iran barangkali memang tidak mungkin dihadirkan. Bahkan bagi sementara kaum Muslimin yang sebelumnya telah kehilangan kepercayaan pada relevansi politik Islam, revolusi Islam Iran kembali menumbuhkan kepercayaan bahwa dunia Islam akan kembali mampu merebut kemerdekaan ekonomi, politik dan budayanya dan akan kembali lagi menjadi suatu kekuatan intenasional yang sangat menentukan. Ditinjau dari dinamika revolusi itu sendiri, Iran sebagai suatu negara yang hakekatnya telah menjadi gerakan Islam internasional yang pasti akan mewarnai dan mempengaruhi persepsi keagamaan umat Islam dunia. Dengan atau tanpa kemauan para pemimpin Iran untuk mengekspor revolusi Islam ke negara-negara lain, revolusi Islam itu sendiri sudah bersifat *self-exporting* karena dimensi idiologisnya yang sangat menonjol, di samping itu revolusi Iran diletakan atas dasar-dasar yang dapat berlaku universal dan mengancam *status quo* yang ada, sehingga hampir setiap rezim yang ada di sekitar Iran, terutama rezim berbagai negara Arab terancam ekstensinya.

Dalam kaitan ini beberapa pandangan pokok Khomaini tentang hubungan antara Islam, sistem internasional dan revolusi menarik untuk dikaji lebih

mendalam. Namun secara garis besar dapat dijelaskan bahwa ia menegaskan berlakunya universalisme Islam. Apa yang dianjurkan Khomaini bukanlah pan-Islamisme, tetapi lebih jauh lagi adalah menegakkan Islam di seluruh muka bumi. Jadi tidak aneh bila tokoh-tokoh revolusi Iran sering mengatakan bahwa tugas Islam adalah membebaskan kemanusiaan *(liberation of mankind),* yakni membebaskan masyarakat manusia di mana saja dari eksploitasi dan penindasan. Transformasi sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di Iran setelah reformasi 1979 memang cukup fundamental dan nilai-nilai baru di sana mulai tumbuh mantap dalam rangka berpikir tokoh-tokoh revolusi Iran agaknya terdapat suatu pengertian bahwa universalisme Islam mengandung implikasi bahwa setiap pojok bumi yang masih mentolerir adanya eksploitasi harus dibebaskan, langsung atau tidak langsung .

Konsekwensi logis pandangan ini adalah bahwa sistem internasional kontemporer harus di tolak. Sistem internasional yang terdiri dari negara-negara bangsa *(natinon states)* yang berasal dari konsepsi westphalia dianggap keliru karena menurut khomeini, negara-negara modern yang mendasarkan diri pada nasionalisme kebangsaan adalah produk pemikiran manusia yang sangat terbatas. Ia melihat dunia sebagai suatu rumah untuk seluruh umat manusia di bawah hukum Tuhan. Sudah tentu pendapat seperti ini tidak saja bernada anakronistik, tetapi juga tidak masuk akal pemikiran modern abad XX. Tetapi justru di sinilah letak keunikan tokoh tua ini. Kendati ia menguasai hampir segala macam

filsafat, sejak dari filsafat Yunani sampai filsafat modern, pemikirannya tentang sistem internasional bagi kita setidak-tidaknya sangat utopis, untuk tidak mengatakan anakronistik. Dalam menilai sistem internasional kontemporer, secara sepintas kelihatan terdapat persamaan antara pandangan Khomeini dan kaum marxis, yaitu sama-sama menganggap bahwa sistem internasional kontemporer bersifat eksploitatif. Namun jika ditinjau lebih jauh akan diketahui bahwa menurut Khomeini sistem internasional versi marxis juga bersifat eksploitatif karena yang dimasukan ke dalam satanical powers tidak saja Amerika, tetapi juga Uni Soviet dan bahkan setiap kekuatan yang melayani super power (Amerika menjadi "setan besar" berdasarkan eksploitasi Amerika atas Iran zaman Syah).[9]

Bila kita membandingkan antara revolusi Islam Iran, revolusi Perancis dan revolusi Bolshevik tampaklah bahwa ketiganya meyakini aplikabilitas universal revolusi masing masing. Revolusi Bolshevik pimpinan Lenin ingin menyatukan kaum proletar di seluruh dunia dan menghacurkan kekuatan kapitalisme internasional dalam rangka mendirikan suatu dunia baru tanpa kelas dan tanpa negara. Demikian juga revolusi Perancis dengan semboyan *liberte, egalete, fraternite dan guerre aux chateaux, paix au chaumieres* (perang terhadap istana dan damai di antara rakyat jelata) mencita-citakan suatu masyarakat baru yang menjadi cikal-bakal negara-negara republik. Sementara itu Revolusi Iran tidak ingin membatasi gerakannya pada wilayah Iran saja, sesuai dengan salah satu tema pokok yang selalu

didengungkan para pemimpin Iran, bahwa tujuan akhir revolusi mereka adalah tercapainya suatu tata dunia Islami *(the establishment of an Islamic Word order)*. Untuk mencapai tujuan itu setiap negara yang lemah (*mustadh'afien* internasional) harus bersatu menghadapi kesewenag-wenangan negara-negara adikuasa. Sikap permusuhan Iran terhadap kedua *super power* diformulasikan dalam semboyan *la ghorbiyah wa la syarqiyah*, yakni tidak pada Barat dan tidak kepada Timur. Dengan kata lain, Iran ingin benar-benar mencapai kedaulatan dan kemerdekaan penuh bebas dari ketergantungan pada salah satu negara adikuasa. Sekalipun demikian perlu dicatat bahwa semboyan *neither west, nor east*, tidak mengandung implikasi ekuilibrium negatif atau keseimbangan negatif – yakni sekedar menolak Barat dan Timur – tetapi sebaliknya untuk tidak terpeleset ke dalam pengaruh salah satu negara adikuasa dan sekaligus menumbuhkan nilai-nilai baru dalam hubungan imternasional berdasarkan ideologi Islam.

Bagi Amerika dan Uni Soviet pandangan revolusioner seperti dikemukakan Khomeini dan para pengikutnya sudah tentu cukup mengagetkan dengan perhitungan bahwa jika revolusi Islam Iran sampai menjalar ke bagian dunia ketiga lainnya atau ke dunia Islam maka kepentingan-kepentingan negara-negara adikuasa akan terdesak. Hal ini dapat menerangkan mengapa baik Washington maupun Moskow tidak ingin melihat revolusi Iran 1979 berhasil mencapai tujuannya. Invasi Iraq terhadap Iran pada 22 september1980 merupakan usaha kolaboratif Baghdad dan Washington untuk menggagalkan

kelanjutan revolusi Iran. Dengan segala cara media massa Barat mencoba memperkecil arti revolusi Iran sambil memaparkan berbagai distorsi mengenai Iran pasca-revolusi agar tercapai suatu publik opini dunia yang tidak bersahabat pada Iran. Pada batas-batas yang cukup jauh, propaganda anti-Iran oleh pers Barat cukup berhasil, tidak saja di dunia Barat sendiri, tetapi juga di dunia ketiga, termasuk di dunia Muslim. Isu yang dikembangkan di dunia Muslim kemungkinan ekspansi Islam Syi'ah di dunia Sunni, jika republik Islam Iran sampai berhasil mempertahankan hasil-hail revolusinya. Berbagai rezim di dunia Muslim juga menjadikan isu ini sebagai isu utama, sehingga Iran lebih ditakuti daripada rezim komunis. Anehnya sebagian umat Sunni termakan, atau karena kebodohannya, memakan isu tersebut.

Kekhawatiran Moscow dan Washington terhadap revolusi Iran sudah tentu bukan karena Islam Syi'ah akan menjalar ke Uni Soviet atau Amerika dan Eropa; suatu hal yang mustahil. Kekhawatiran itu terletak pada kenyataan bahwa satu atau dua revolusi semacam revolusi Iran yang terjadi di dunia Islam pada khususnya atau dunia ketiga pada umumnya akan dapat mengubah konfigurasi dan konstelasi politik internasional kontemporer. Sudah pasti Moskow dan Washington tidak akan menyukai hal ini. Sesungguhnya berbagai rezim di negeri Muslim juga memiliki kekhawatiran serupa. Jika revolusi tipe Iran sampai terjadi di negara-negara Arab misalnya, maka hal ini akan berarti gulung tikarnya emirat atau monarki atau tirani berbaju demokrasi dan berbagai *vested interests* yang menyertainya dan

putusannya ketergantungan mereka pada "belas kasihan" negara-negara besar (Amerika atau Soviet) setelah menjadi negara-negara *protégé* terlalu lama. Tanpa *political will* yang kuat seperti Iran, belum tentu mentalitas ketergantungan dapat diubah dalam dua atau tiga generasi. Jadi ketakutan kebanyakan rezim di negeri-negeri Muslim pada hakekatnya sama sekali bukan terhadap Islam Syi'ah *as such,* tetapi terhadap substansi revolusi Iran 1979 yang populasi, anti-tirani dan berorientasi pada kepentingan massa rakyat.

Di mata Iran setelah revolusi, rezim seperti Arab Saudi tidak lebih dari tangan panjang Amerika Serikat di Timur Tengah dan telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti Syah. Arab Saudi selalu membongkok di hadapan kemauan Amerika dan tidak berani mengambil kebijakan nasional secara bebas tanpa mempertimbangkan keinginan dan reaksi yang mungkin timbul dari Washington. Pemborosan kekayaan minyak dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang tidak realistis dan penciptaan kehidupan konsumeris yang hanya menguntungkan Barat dianggap oleh Iran sudah melampaui batas-batas kewajaran (limits of tolerance). Juga kehidupan foya-foya para pangeran Saudi di rumah-rumah kasino dan klub-klub malam di Eropa dan Amerika hanya memperbesar hipokrisi Saudi di mata Iran yang sedang berkonfrontasi dengan Amerika. Klaim Saudi sebagai pelindung bangsa-bangsa Arab dan tempat-tempat suci Islam bertentangan dengan kenyataan keras di mana Saudi tetap berkolaborasi dengan Amerika, pemberi senjata dan pelindung buta bagi Israel. Demikian pula belum

pernah dibuktikan bahwa Saudi telah membantu bangsa Palestina secara substantif dan berusaha untuk membebaskan Jerusalem. Di sisi itu, bukankah pemerintahan monarki bertentangan dengan Islam? dari pandangan Iran terhadap Saudi seperti ini mudah dipahami, mengapa Iran sangat kritis terhadap Saudi atau rezim lainya yang hakekatnya mirip dengan Saudi.[10]

Sejak revolusi Iran 1979 sampai sekarang para pemimpin Iran menunjukkan komitmen penuh untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya determinan seluruh kebijakan domestik maupun luar negerinya. Hal ini mudah dipahami berhubungan revolusi itu sendiri telah mencita-citakan tegaknya kembali Islam sebagai kerangka dasar *(ultimate frame work)* bagi kehiduupan sosial dan politik Iran. Legitimasi Republik Islam Iran akan hilang seandainya pembangunan nsional Iran kemudian menggunakan kerangka dasar lain. Jika dilihat dari konstitusinya, komposisi pemerintahan dan kebijakan –kebijakan dasarnya, Iran menunjukkan komitmen total untuk merealisasikan suatu negara Islam. Berdasarkan konstitusi, negara wajib melakukan Islamisasi institusi-institusi budaya, sosial, politik dan ekomomi yang dimilikinya. Tujuan ini akan dicapai dengan segenap usaha terus-menerus di bawah pimpinan para *fuqaha* dan pemanfaatan semaksimal mungkin penemuan ilmu dan teknologi. Dalam dukungan ini perlu kiranya dicatat bahwa Iran yang dituduh ingin kembali ke abad pertengahan dalam kenyataannya sangat sadar terhadap penting-mutlaknya penguasaan ilmu dan teknologi. Bahwa

70 % dari menteri-menteri dalam kabinet Iran adalah pemegang master atau *Ph.D* dari berbagai Universitas terkemuka di dunia menunjukan pula keluasan pandangan para pemimpin Iran di zaman Khomeini. Sejak revolusi, peranan Islam juga menjadi semakin kuat lewat institusi parlemen (majlis). Secara teoritik majelis mencerminkan aneka opini dalam masyarakat Iran, namun dalam prakteknya memang di dominasi oleh suara Partai Republik Islam, partai terbesar di Iran saat itu. Agaknya tidak ada lagi bidang kehidupan masyarakat Iran yang tidak terkena proses Islamisasi, setidak-tidaknya secara nominal. Pada mulamya Khomeini dan peran pemimpin lainya cukup puas dengan suatu pertanyaan yang sangat umum, yaitu superioritas Islam terhadap setiap ideologi sekular. Dalam kelanjutannya, untuk membuktikan kebenarannya itu para pengelola negara dalam esolan masing-masing masih harus bekerja keras untuk menciptakan dalam mengarahkan supaya seluruh institusi negara dan masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Di samping itu proses revitalisasi nilai-nilai Islam dalam seluruh institusi negara, posisi wanita diperbaiki dan dihindarkan dari pengaruh kebudayaan Barat yang korup dengan memfungsikan kembali *chador,* dan jika pemakaian ini dianggap tidak praktis untuk profesi tertentu, setidak-tidaknya *head-scarf* harus dikenakan. Implementasi aturan Islam dalam hal seperti chador dan scarf, pelarangan alkohol dan pornografi sebegitu jauh tidak sedikit pun menemui rintangan. Tetapi nampaknya yang lebih sulit adalah bagaimana cara mengimplementasikan ajaran-ajaran

Islam tentang keadilan sosial. Dalam kaitan ini harapan besar telah ditumbuhkan rakyat Iran untuk melihat suatu distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata, suatu sistem kesejahteraan sosial yang benar-benar Islami dan berakhirnya diskriminasi segala tingkatan yang selama ini didasarkan atas perbedaan kelas. Realisasi penyelenggaraan keadilaan sosial sudah tentu akan makan waktu untuk menyelesaikannya, mengingat persoalan-persoalan politik dan ekonomi yang dihadapi Iran sangat kompleks akibat faktor-faktor yang tidak mendukung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Hal ini mengingatkan kita pada revolusi luar negeri Iran.[11] *Pertama,* penolakan terhadap "ketergantungan" baik pada Barat maupun Timur. *Kedua,* identifikasi Amerika Serikat sebagai musuh utama (doshman-e asli) revolusi Islam. *Ketiga,* perjuangan melawan negara-negara adikuasa dan kekuatan Zionis. *Keempat,* hubungan baik dan akrab dengan seluruh rakyat tertindas, terutama yang berada di negeri-negeri Muslim. *Kelima,* pembebasan Jerusalem dan oposisi terhadap setiap negara yang pro-Israel. *keenam,* anti imperiallisme dan *ketujuh* membantu seluruh rakyat tertindas (*musthadafien*) di mana saja di muka bumi ini. Segera harus di catat bahwa prinsip-prinsip ideologi ini adakalanya dalam praktek tidak dapat dipegang secara konsisten, berhubungan setiap negara selalu menghadapi dilema antara ideologi pragmatisme. Dalam konteks Iran bisa disebutkan di sini dilema tersebut. Misalnya, Ali Akbar Velayati, Menteri Luar Negri Iran, mengatakan bahwa dalam menjalankan hubungan internasionalnya Iran akan

memberikan prioritas tertinggi pada negara-negara muslim, kemudian negera-negara dunia ketiga barulah negara lain. Sementara itu Ali khamenei, presiden Iran, menyatakan bahwa oleh Iran dunia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu negara saudara (brotherly countries), negara sahabat, negara netral dan negara musuh. Negara-negara musuh adalah mereka yang melancarkan agresi terhadap Iran dan bersikap anti Iran. Selainnya adalah negara saudara, atau negara sahabat, atau pihak netral. Pernyataan Velayati adalah tuntunan ideologi, secara dangkal pernyataan khomeini tuntunan pragmatis suatu pernyataan yang sering muncul adalah apakah Iran akan melakukan subversi dan agresi untuk "mengekspor revolusinya?" apa yang dikatakan Mir Husayn Mussavi, bekas menteri luar negri Iran barangkali dapat atas pertanyaan ini.

Kami telah berulangkali menyatakan bahwa kami tidak memiliki niatan sedikit pun untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain, tetapi apa yang telah mengguncangkan dunia Islam adalah gerakan yang lahir dari revolusi Iran di antara massa kaum Muslimin dunia, dan, sudah tentu masing-masing. Mereka akan memaksan pemerintah mereka untuk menempuh jalan yang dipilih rakyatnya dan, jika tidak, sudah pasti pemerintah itu akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri.[12]

Tentulah sulit bagi kita untuk mengetahui secara pasti kebenaran setiap *statement* yang diucapkan para negarawan. Meskipun demikian ucapan Mussavi itu dapat menjadi semacam indikasi bahwa Iran lebih mengandalkan dampak psikologis revolusinya atas

rakyat di dunia Islam dan bukan cara-cara konvensional intervensi dan subversi antara negara. Matt dunia memang selalu mengamati perjalanan revolusi Islam Iran sejak 1979. Jika revolusi itu relatif berhasil mencapai cita-citanya, otomatis daya tariknya bagi dunia Islam akan semakin kuat. Selain itu kontroversi konsepsional tentang apakah Islam dapat dijadikan dasar suatu negara modern ataukah tidak akan berakhir secara tuntas. Sebaliknya jika sampai gagal, daya tarik revolusi Iran akan sirna perlahan-lahan. Kita sengaja agak panjang membahas Islam di Iran setelah revolusi, karena Republik Islam Iran pada hakekatnya telah menjadi suatu "gerakan Islam Internasional" yang paling besar.

Pengaruh terhadap Gerakan Islam di Indonesia

Dalam tulisan ini tidak mungkin dibahas secara panjang lebar pengaruh gerakan-gerakan Islam internasional seperti al-Ikhwan al-Muslim dan Republik Islam Iran terhadap gerakan Islam di Indonesia. Sekalipun demikian kita akan mencoba melihat pengaruh itu secara singkat. Hampir setiap organisasi Islam di Indonesia pada hakekatnya dapat dikatakan merupakan "gerakan". Misalnya, Muhammadiyah oleh para pemimpinnya disebut sebagai gerakan da'wah *amar ma'ruf nahy munkar.* Sebelum membahas pengaruh gerakan Islam Internasional di Indonesia, yang pertama kali harus diingat ialah bahwa tidak semua dari sekitar 85 % rakyat Indonesia yang nominal beragama Islam mengidentifikasi dirinya dengan gerakan-gerakan

Islam yang ada. Bila dilihat hasil-hasil pemilu tahun 1955 dan tiga pemilu di zaman orde baru (1971, 1977 dan 1982), partai-partai politik Islam boleh dikatakan tidak mewakili mayoritas. Dalam pemilu 1955 empat partai Islam pada waktu itu hanya dapat mengumpulkan kurang dari 45 % dari seluruh suara, sedangkan dalam ketiga pemilu di masa orde baru partai Islam hanya meraih kurang dari sepertiga jumlah suara. Namun kekuatan politik Islam yang sesungguhnya (riil) sulit untuk diketahui berhubung banyak orang Islam yang enggan menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai politik.

Sementara itu di kalangan umat Islam sendiri terdapat dua kelompok besar, yaitu kelompok modernis yang bercirikan *straight for word Islam* dan kelompok tradisionalis yang bercirikan *domesticated Islam*. NU barangkali adalah wakil yang tepat untuk kelompok kedua, mengingat dalam sejarahnya NU tidak pernah menjadi kekuatan oposisi yang berarti, di samping mudah sekali di kooptasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Apa yang pernah dikatakan oleh Ali Maksum, salah seorang tokoh NU, bahwa NU akan berjaya selama dekat dengan pemerintah dan akan mundur jauh dari pemerintah adalah suatu pernyataan yang jujur. Sebagai gerakan Islam yang pernah dipimpin ulama, NU memang tidak bisa bersikap lain, ditambah kenyataan bahwa hampir di mana saja di dunia muslim, kebanyakan ulama tergantung pada pemerintah. Sulit untuk mengharapkan mereka dapat berpikir dan bersikap bebas. Ulama bukanlah *direct producers* dan juga bukan *producers of wealth*, dalam istilah sosiologi. Jadi mereka

memang tergantung pada umat lewat pesantren misalnya, dan yang lebih jelas lagi adalah ketergantungan ulama pada pemerintah di masa orde lama, keikutsertaan NU dalam kereta Nasakom membuktikan betapa NU tidak mungkin bersikap lain kecuali sesuai kehendak pemerintah. Hal yang sama dapat juga kita lihat dalam fenomena muktamar NU di Situbondo 1984 di mana barisan ulama NU demikian responsif terhadap keinginan pemerintah. Secara simbolis sikap ini tampak misalnya ketika para kyai yang biasa dicium sebagian pengikutnya, ganti mencium tangan para pejabat.

Muhammadiyah sementara itu, dapat kita katakan mewakili kelompok reformis. Usaha-usahanya pada pemahaman Islam yang lugas serta pencerdasan umat diwujudkan dalam ribuan sekolah dan madrasah yang dimilikinya. Namun akhir-akhir ini spirit pembaharuan di kalangan Muhammadiyah terlihat mengendor dan tampaknya sementara pimpinannya memang tidak melihat cakrawala yang lebih jauh. Dalam zaman yang ditandai perubahan cepat di segala bidang kehidupan pada akhir abad XX ini, Muhammadiyah tampak *exhausted* sehingga perlu melakukan reorientasi dan revisi terhadap kerangka berpikirnya yang sudah begitu responsif pada perkembangan jaman. Jika Muhammdiyah mampu menghidupkan lagi spirit pembaharuannya dan mampu berdiri di depan sejarah dengan mendorong ijtihad terhadap masalah-masalah yang relevan dengan tuntutan masyarakat Indonesia yang segera memasuki abad XXI nanti misalnya masalah-masalah keadilan sosial, pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta giat melakukan penelitian dan pengembangan dalam masalah-masalah sosio-ekonomi, sosial budaya dan sosio-politik maka kemungkinan besar gerakan Islam yang lahir tahun 1912 ini dapat kembali mempunyai daya tarik kuat bagi masyarakat Islam Indonesia.

Harus kita catat bahwa umat Islam Indonesia jauh lebih besar dan luas daripada sekedar warga Muhammadiyah ditambah warga NU, Masih ada berpuluh-puluh juta kaum muslim yang tidak menjadi anggota gerakan Islam seperti Muhammadiyah maupun NU, termasuk mereka yang pernah mnganggap Masyumi sebagai penyalur aspirasi politiknya dan sekarang tetap floating tanpa bergabung dengan salah satu organisasi formal Islam. Selain itu yang tidak mudah dihitung dengan pasti adalah seberapa jauh sesungguhnya proses "santrinisasi" di kaum abangan telah terjadi. Proses identifikasi diri sebagai Muslim makin tampak di kalangan lapisan birokrat yang sering dianggap sebagai *stronghold* umat Islam abangan dan kaum priyai. Juga di kalangan pelajar, mahasiswa dan kaum intelektual, antusiasme mendalami agama Islam tampak dilakukan lebih intensif. Jika proses ini berjalan mulus, dinding-dinding pemisah antara kaum santri dan kaum abangan dan kaum priyayi akan semakin tipis dan tidak akan banyak artinya lagi di masa depan.

Bagaimanakah pengaruh gerakan Islam dari dunia muslim lainnya terhadap umat Islam Indonesia? Tampaknya jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada situasi obyektif yang sedang

berkembang di Indonesia. Setelah berakhirnya zaman demokrasi parlemen pada 1959, peranan politik umat Islam merosot dengan cepat. Pada waktu demokrasi terpimpin peranan politik itu hanya bersifat periferal dan secara simbolik diwakili NU dalam kekuatan nasional yang tergolong dalam Nasakom, para anggota Masyumi (dan juga PSI) dalam zaman Orde Lama dipandang sebagai golongan kontra-revolusioner dan akibatnya mengalami alienasi politik cukup jauh. Bahkan dalam mars " Nasakom " ada bait yang berbunyi " Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu". Yang dimaksudkan sebagai kepala batu adalah Masyumi dan PSI. Dengan lahirnya orde baru, peranan politik Islam seperti diharapkan umat Islam tidak menjadi kenyataan; malahan sebaliknya. Dengan digembosinya partai-partai kekuatan politik, PPP yang secara teoritis mewakilki umat Islam – katakanlah kelompok santri – juga lumpuh. Dalam kaitan ini dapat disebutkan bahwa *political engineering* pemerintah Orde Baru sangatlah berhasil; dan lebih berhasil lagi setelah Pancasila dijadikan asas tunggal seluruh orpol dan ormas tanpa kecuali. Bila arah politik yang sudah berjalan tidak ada perubahan, maka boleh jadi kekuatan politik Islam di atas permukaan akan habis. Satu hal yang paling sulit dipahami adalah mengapa kita terperangkap dalam jargon politik yang hanya mengandung separuh kebenaran, yang implikasinya sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa musuh Pancasila adalah ekstrim kiri (PKI) dan ekstrim kanan? Kalau ini dialamatkan pada kekuatan politik Islam, barangkali kita semua telah melakukan kesalahan

besar. Kecuali DI/TII dan kelompok-kelompok kecil yang tidak berarti, tidak ada unsur-unsur dalam pemimpin maupun masa umat Islam yang ingin mengubah dasar negara seperti dituduhkan orang. Karena itu penciptaan istilah "ekstrim kanan" mungkin bermotivasi agar umat Islam tidak usah ikut dalam *sharing of power*. Kalau memang ini alasan sesungguhnya, istilah "ekstrim kanan" itu perlu dihilangkan dalam perbendaharaan berbagai penataran resmi atau tidak resmi, untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Deprivasi politik umat Islam tampaknya bergandengan dengan deprivasi ekonomi yang makin mencolok.[13] Sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia di zaman orde baru sesungguhnya tidak berjalan paralel. Demokrasi Pancasila menentang liberalisme politik, tidak mengakui adanya oposisi, dan menghapuskan "gejala-gejala dekaden" multi-partai serta memecahkan setiap permasalahan politik lewat "konsensus". Sebaliknya, sistem ekonomi Indonesia lebih kurang menyerupai ekonomi kapitalis di mana pintu dibuka lebar buat masuknya modal MNCs (*Multi National Corporations*) atau TNCs *(Trans National Corporations)* secara besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proses Ekonomi yang telah berjalan selama ini mengingkari teori *trickle-down effect,* terbukti dari jumlah rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (sekitar 35 %). Di samping itu sektor ekonomi modern didominasi perusahaan-perusahaan aliansi pejabat, pedagang non-pribumi dan investor asing. Kenyataan ini dianggap oleh sementara orang sebagai

penghalang usaha-usaha nasional yang semula dilakukan para wiraswasta muslim denga atau tanpa dukungan partai-partai Islam. Bangkrut atau merosotnya industri tekstil dan perusahaan-perusahaan batik karena tidak mampu berkompetisi dengan modal asing adalah sekeping contoh. Usaha yang telah dan akan dilakukan pemerintah lewat delapan jalur pemerataan dan lain sebagainya agaknya dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan sosio-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Bagaimana akhir proses ekonomi yang berjalan sekarang ini yang pada tahap cukup jauh menuruti *the law of capitalist accumulation*.

Ditengah kecenderungan politik dan ekonomi tersebut, bagaimanakah pengaruh gerakan Islam Internasional seperti al-Ikhwan dan Republik Islam Iran? ini tergantung pada proses politik, sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Perlu kita sadari bahwa dalam dunia yang semakin mengkerut karena kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi, pengaruh luar yang berujud apapun mudah sekali masuk negara kita. Gagasan Ikhwan atau pikiran dari Iran atau darimana saja, dapat kita peroleh semudah kita memperoleh kaset-kasset Michael Jackson atau Barbara Streisand. Jangan sampai kita berilusi bahwa kita dapat menutup diri dari arus pemikiran yang sedang bertiup di dunia Islam, di dunia ketiga, maupun yang datang dari barat dan timur. Berdasarkan pengalaman, kita dapat melihat bahwa gagasan-gagasan revolusioner Ikhwan selalu memperoleh tempat subur di negeri-negeri muslim yaang berada dalam masa-masa kritis. Potensi

laten Ikhwan menjadi kekuatan aktual dahsyat setelah kekalahan Arab pada perang Arab-Israel 1967 dan pada waktu Anwar Sadat terlalu jauh mendorong politik *infitah* yang mengakibatkan munculnya "kucing-kucing gemuk" *(al-qutt samin,* istilah Mesir untuk para OKB) dan pemelaratan lapisan bawah rakyat Mesir. Demikian juga di Suriah, ideologi Ikhwan menjadi laris akibat rezim partai Ba'ath yang *alawit* memonopoli kekuasaan dengan mengabaikan mayoritas partai sunni. Apa yang terjadi di Iran tahun 1979 juga membuktikan bahwa revolusi Islam berkobar karena kondisi obyektif di sana memang sudah matang akibat antara lain: meluasnya korupsi, jurang lebar antara lapisan elit dan massa rakyat, dipojokkannya agama dalam proses modernisasi, *crackdown* yang terjadi secaa rutin terhadap mereka yang tidak sejalan dengan rezim baik yang aktual maupun yang potensial, dinomorduakannya kepentingan rakyat diawah kepentingan asing (kepentingan berbagai MNCs), pemberangusan surat kabar yang mengatur kritik, dipegangnya seluruh jajaran *intelligence* di tangan minoritas kaum Bahai, dan lain sebagainya.

Dengan demikian selama masyarakat Indonesia tidak menghadapi situasi krisis, kita tidak akan *vulnerable* terhadap ideologi revolusioner ala Ikhwan ataupun Islam Syi'ah Iran. Gerakan-gerakan Islam seperti NU dan Muhammadiyah sudah begitu kukuh, tidak gampang kena pengaruh doktrin revolusioner dari negeri-negeri muslim lain. Umat Islam Indonesia juga pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh persepsi Islam dari luar yang mau tidak mau

dipengaruhi lingkungan politik, ekonomi dan budaya serta latar belakang sejarah masing-masing, apa lagi jika di Indonesia sendiri tidak terjadi suatu situasi yang tergolong kritis. Dalam suasana kritis Islam memang memberikan wahana Ideologis yang revolusiner. Walaupun demikian revolusi Islam Iran misalnya, pasti juga punya dampak tertentu bukan hanya bagi umat Islam saja, tetapi juga rakyat Indonesia pada umumnya. Seperti dikatakan seorang penulis:

......dampak terpenting revolusi Iran terhadap opini Indonesia bukan terletak pada perskripsi-perskripsi tentang orde sosial dan kepemimpinan keagamaan (seperti ditunjukkan oleh revolusi Iran) – mengenai hal ini jelas pandangan orang-orang Islam sendiri jelas campur aduk – tetapi justru terletak pada apa yang didemonstrasikan revolusi Iran bahwa kemauan rakyat yang disatukan di bawah panji-panji Islam dapat mengalahkan suatu despotisme yang ditunjang oleh suatu kekuatan militer dan dukungan Barat.[14]

Bila kita mampu mengelakkan situasi krisis, bersedia terus melakukan demokratisasi politik dan ekonomi, dan mendengarkan aspirasi yang tumbuh dari bawah, sudah tentu kita akan kalis dari setiap revolusiner darimanapun datangnya. Islam tidak akan mampu mendorong suatu revolusi jika suatu kondisi obyektif yang ada disuatu negara memang tidak kritis revolusiner. Akhirnya perlu diungkapkan, bahwa jelas umat Islam tidak punya ilusi untuk menolak pemerintahan Indonesia yang ditulangpunggungi oleh angkatan bersenjata, khususnya TNI-AD. Kelihatan jelas juga bahwa yang diharapkan oleh umat Islam hanyalah kebijakan-kebijakan nasional

yang lebih akomodatif terhadap aspirasi mereka, dan tidak membiarkan pimpinan umat pada posisi periferal terus-menerus. Dengan perkataan lain, unsur-unsur pimpinan umat secara representatif perlu pula dimasukkan kedalam sistem yang ada. Pendeknya, alienasi politik dan ekonomi umat Islam harus dihindari.[15]

Catatan Kaki

1. Lihat misalnya Wilfred C. Smith, *Islam in Modern History* (princeton: princeton University Press, 1977); Juga Michael Hudson, *"Islam and political Development"* dalam John L. Esposito (ed), *Islam and Development* (Syracuse University Press, 1980).

2. Lihat misalnya Bernard Lewis, *"The Return of Islam", Commaentery* (January 1976); PJ. Vatikioastis, *"What is an Islamic Revival?, New Society* (15 February 1979); Thomas Hodgkin, *"The Revolutionary Traditional of Islam", Race & Class* (3, 1980); dan Maxime Rodinson, "Islam Rseurgent? ", *Gazelle Review of Literatur on the Middle East* No. 6, 1979).

3. Sejarah dan program-program Ikhwan dapat dibaca misalnya dalam Richad Mitchell, *The society of the Muslim Brothers* (Lomdon: Oxford Unicersity Press, 1969); M. Ishak Husaini, *The Moslem brethren: The Greatest of the Modern Islamic Moveement* (Beirut: Khayat, n.d.); Zakarya Basuni, *al-Ikhwan al-Muslimun wa al-Jama'at al-Islamiyah* (Cairo: Makatbah Wahab, 1978); dan Mahmud Abdul Hakim,*Al-Ikhwan al-Muslimun: Ru'yah min al-dakhil* (Alexandria:Dar al-Da'wah;n.d)

4. Ali E.Hillal Desouki, *"The Resurgence of Islamic Organization In Egypt: An Interpretation"*, dalam alexander S.Cudsi dan ali E. Hillal Dasuki, eds., *Islam And Power* (London: Croom Helm, 1981).

5. Pengertian ideologi semacam ini dikemukakan oleh Edward Shils, "Ideology", *International Encyelopaedia of the Social Sciences* (The Macmillan Companya and the Free Press, 1968).

6. Antara lain dapat dibaca dalam Sayid Quthb, *al-'Aladdin al-Ijtimaiyah* (Cairo: Dar al-Syaruq, 1978); Musthofa as-Shiba'I *Isyatirakiyatul Islam* (Cairo; Maktabah Wahbah, n.d.) dan yusuf Qardhawi, *Musykilatul Faqr* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1977).

7. Buku-buku menarik tentang revolusi Iran antara lain adalah Ervand Abrahamian, *Iran Between Two Revolutions* (Princeton: Princeton University Press, 1982): Leonard Binder, *Revolution in Iran* (New York; Middle East Review Special Studies, 1980); Sharough Akhavi, *Religion and Politics in Contemporay Iran* (Albany; State University of New York Press, 1981); dan Suroosh Irfani, *Revolutionary Islam in Iran* (London: Zed Books Ltd., 1983).

8. Buku-buku Dr. Ali Syari'ati antara lain adalah *On the sociology of Islam, Marxiismand Other Western Fallaciees, Man and Islam,* dan *Hajj* (Semuany sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia); Pamflet-pamfletnya antara lain *Islamic View of man, Selection and/or Election,* dan lain sebagainya. Damjjpak Revolusi Iran dibahas luas oleh Oxford Analytica, The Resurgence of Islam and Its Implications (Oxford: Oxfird Analytica Limited, 1981).

9. Dampak Revolusi Iran dibahas luas oleh Oxford Analitica, *The Resurgence of Islam and Its Implications* (Oxford: Oxford Analitica Limited, 1981).

10. Edward Mortimer, *Faith & Power: The Politics of Islam* (new york: Vintage Books, 1982), hal. 357.

11. R.K. Romazani "Khumayani's Islam in Iran's Foreign Policy" Dalam Adeed Dawish, ed, Islam in Foreign Policy (Cambirdge University Prees, 1983).

12. Jbid, hal. 21 – 22

13. Deprivasi ganda, politik dan ekomomi dibahas sangat baik oleh Ernst Utrecht, "The Muslim. Merchant Class in the Indonesian Social and Political Struggle ", Social Compass (XXX/I, 1984).

14. Ruth Mevey, "Faith as the Outsider: Islam in Indonesia Politics "dalam James Piscatori, Idlam in the Political Process (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), hal. 220.

15. Lihat juga pendapat Harols Crouch, "Indonesia", dalam Mohammed Ayoeb, ed., The Polirics of Islamic Reassertion (London: Croom Helm), hal. 206 – 207.7

Umat Islam Dengan Lokomotif Lain

Tempo edisi 14 Juni lalu menulis perkembangan Islam dalam masyarakat kita dewasa ini, sambil mengungkapkan' peranan besar' Nurchollis Madjid sebagai penyebab utama kesemarakan syiar dan da'wah Islam itu. Terus terang, selesai membaca laporan utama itu, saya berkesimpulan bahwa kesemarakan Islam, yang sesungguhnya cukup komplek, telah disederhanakan secara berlebihan (oversim-plifikasi) oleh Tempo. Seolah-olah syiar dan kegiatan Islam, yang berwujud apa saja di Indonesia sekarang ini, ibarat gerbong-gerbong ditarik oleh Nurcholis Madjid sebagai lokomotif, Kesimpulan seperrti ini jelas naif dan jauh dari kenyataan.

Saya kira, syiar Islam yang meriah sekarang ini di sebabkan beberapa hal, *Pertama*, sejak dicanangkan Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, Islam sebagai kekuatan politik mengalami kemandekan, yang secara relatif berlanjut sampai sekarang, kemandekan inilah yanng mendorong umat Islam menggerakan kegiatan sosial, pendidikan, budaya, serta da'wah secara intensif. Energi umat yang dulu tersedot dalam kesibukan politik, kemudian dialihkan ke berbagai kegiatan nonpolitik.

Kedua, watak Islam yang senantiasa dinamis tidak memungkinkan para pemeluknya bersikap statis. Islam tidak mungkin mengalami enkapsulisasi – bersembunyi dalam kapsul, dan kemudian non aktif. Watak, dinamis dan kreatif itulah yang menyebabkan, mengapa Islam demikian luwes dan terus hadir dalam segala cuaca politik. Islam di Indonesia, telah berperan sebagai motivator dalam perjuangan nasional, dan selalu menggugat kemapanan yang dirasa tidak adil.

Ketiga, khusus di kampus, fenomena dakwah yang pada tujuh atau delapan tahun terakhir ini terasa terus meningkat pada hakikatnya didorong oleh kesadaran beragama para mahasiswa yang makin mendalam. Kebetulan saya sering berkunjung ke berbagai kampus, mendatangi kegiatan diskusi, ceramah atau seminar yang berkaitan dengan topik-topik ke-Islaman. Rasanya, memang ada semacam *Inner transformation* – perubahan kedalaman penghayatan agama di kalangan para mahasiswa kita. Kedalaman inilah yang dapat menerangkan mengapa kegiatan-kegiatan seperti "Ramadan di kampus", yang mula-

mula disangka orang hanya musiman dan akan cepat hilang, justru makin lama makin mantap.

Keempat, penuhnya masjid dengan anak-anak muda sekarang ini, di samping berkat kesadaran dari dalam, juga karena ekologi sosial, politik, dan budaya, yang terus berubah seirama dengan proses pembangunan. Dalam proses pembangunan yang membawa perubahan nilai-nilai itu, secara sosio-psikologi timbul semacam krisis identitas di kalangan pelajar dan mahasiswa kita. Identifikasi mereka merasa menemukan dirinya dalam ajaran-ajaran Islam.

Kelima, generasi muda kita yang makin terpelajar menyadari peliknya memecahkan berbagai masalah nasional nyang menghadang Indonesia di masa depan. Sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Islam yang makin komprehensif, banyak diantara mereka yakin bahwa Islam dapat memberikan kontribusi besar bagi pemecahan masalah-masalah nasional itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa bagi mereka Islam menjanjikan alternatif-alternatif.

Hal-hal itulah yang, menurut saya, dapat menerangkan sebab-sebab kemeriahan syiar Islam pada tahun-tahun terakhir ini. Mencari asal-usul meningkatnya syiar Islam sekarang ini pada ribut-ribut mengenai keharusan sekularisasi (apapun artinya), yang melibatkan polemik tiga atau empat tokoh pada awal 1970-an, barangkali terlalu over simplistis. Saya melihat isu-isu kontroversial dengan istilah-istilah yang cenderung mengandung kekacauan semantik, seperti sekularisasi dan desaklarisasi, jika toh punya andil dalam membentuk kesemarakan syiar Islam dewasa ini, hanya bersifat periferal.

Dengan atau tanpa isu-isu kontroversial di atas, dinamika pemikiran kaum terpelajar Muslim ke arah Islam agaknya sudah merupakan keharusan sejarah. Di dunia Islam, kaum mudanya memang menghadapi suatu dilema yang ganjil. Mereka tidak suka pada Islam formalis yang mandek dan dihadapkan pada dua pilihan besar: mengikuti modernisme yang membawa masyarakat pada gaya hidup konsumeris dan berorientasi pada kapitalisme Barat, atau, menerima marxisme dengan basis falsafahnya yang materialistis. Dilema ini dicoba diatasi dengan kembali ke Islam, walaupun, dan ini mereka sadari sepenuhnya, dibutuhkan waktu relatif cukup panjang untuk itu.

Di kampus, pemikiran-pemikiran yang tumbuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan isu-isu kontroversial awal 1970-an, ketika Pak Nurcholish, Pak Rasjidi, dan Endang Saifuddin Anshari asyik berpolemik. Isu-isu itu sesungguhnya sudah berhenti sejak 1973. Tema-tema yang dipikirkan di kampus-kampus sekarang ini jauh lebih berbobot dan relevan. Misalnya soal Islam dalam pengakuan dan penegakan sosial, Islamisasi pengetahuan, serta Islam dan pembaruan pendidikan.

Barangkali memang benar ungkapan yang mengatakan, sejarah selalu berulang. Kesemarakan Islam di kalangan kaum terpelajar dan semangat mempelajari Islam di berbagai kampus, menurut sejarawan Taufik Abdullah, mirip dengan apa yang dilakukan Mohammad Natsir, Roem, dan kawan-kawan membuat mereka tidak puas dengan pendidikan Belanda yang mereka peroleh, dan juga bosan dengan rutinisasi. Mereka bersemangat belajar agama untuk mencari terobosan-terobosan. Adakah Taufik benar ? Masa depan akan membuktikannya.

Islam Sebagai Perekat

Nasionalisme adalah produk Eropa. Ketika negara-negara Eropa Barat hendak melepaskan diri dari zaman feodalisme, muncullah gerakan nasionalisme yang mau mengatasi terpecah-belahnya sesuatu bangsa menjadi wilayah-wilayah kecil di mana *land lord* (tuan tanah) menjadi penguasa di wilayah-wilayah kecil itu.

Bersamaan dengan terjadinya revolusi industri, bersamaan dengan perombakan-perombakan struktur dan model produksi yang meninggalkan zaman feodalisme itu, di bidang politik muncul gerakan *nation state* (negara-bangsa). Muncullah negara-negara Inggris, Prancis, Belgia, dan lain-lain.

Pada giliranya produk pemikiran Eropa itu diekspor ke berbagai wilayah, termasuk ke Asia, dan kemudian para pendahulu kita di Indonesia

menyerap gagasan nation-state itu sebagai gagasan modern yang memang banyak segi-segi positifnya.

Salah satu definisi bangsa yang sering dikutip Bung Karno dalam berbagai pidatonya, berasal dari Ernest Renan, seorang filosof dari Perancis. Menurut Renand, suatu bangsa menjadi bangsa terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnisitas, tradisi dan lain-lain kalau kumpulan manusia pada wilayah tertentu itu mempunyai kemauan kuat untuk hidup bersama-sama, dan untuk berbeda bersama-sama.

Indonesia ini, meskipun terdiri dari beratus suku bangsa, beratus bahasa daerah, dan ribuan pulau, tetapi karena kita mempunyai keinginan kuat untuk hidup bersama-sama, maka jadilah kita sebagai bangsa Indonesia.

Wathaniyyah-Qaumiyyah

Kalau kita melihat perkembangan nasionalisme di Timur Tengah, akan tampak dua pengertian. *Pertama,* apa yang disebut *wathaniyyah*, ketanah-airan. *Wathaniyyah* kurang lebih berarti patriotisme atau tanah-airisme.

Setiap kelompok manusia memiliki kecenderungan yang sangat alami untuk bangga, cinta, dan amat hubunganya secara spiritual serta historis dengan tanah tumpah darahnya.

Kedua, di atas *wathaniyyah* ada kecenderungan yang lebih luas yaitu *Qaumiyyah*. Nasionalisme yang lebih luas dari pada sekedar cinta tanah air.

Di zaman modern, *qaumiyyah* dikumandangkan oleh tokoh-tokoh partai Ba'ast di Libanon maupun Siria. Dan pada zaman yang lebih mutakhir, oleh

Presiden Republik Persatuan Arab (RPA), Gamal Abdul Nasser. Menurut Nasser, *qaumiyyah* Arab tidak boleh terperosok ke dalam *wathaniyyah* sempit, kepada nasionalisme Mesir, nasionalisme Saudi, nasionalisme Yaman, nasionalisme Libya dan lain-lain, tetapi harus diangkat menjadi nasionalisme berdasarkan bahasa, ras, dan sampai batas tertentu juga agama. Yang terakhir ini bisa dimengerti mengingat mayoritas bangsa Arab beragama Islam.

Tetapi, seperti kita lihat, *qaumiyyah* itu tidak jalan. Nasionalisme Arab yang luas seperti di gagas Nasser, kandas. Yang jalan justru *wathaniyyah*. Sekarang kita menyaksikan patriotisme atau nasionalisme sempit dikibarkan oleh saudara-saudara kita di Timur Tengah.

Merujuk kepada QS. al-Hujurat ayat 13, al-Qur'an sesungguhnya mengakui eksistensi kebangsaan dalam arti *wathaniyyah* sepanjang tidak meleset berubah menjadi *xenophobisme* –nasionalisme sempit seperti pernah di pertunjukan Nazi-Jerman yang mengakibatkan terbantainya jutaan orang-orang bukan Jerman.

Di Indonesia, insya Allah umat Islam memahami kebangsaan tidak jauh dari pesan-pesan al-Qur'an.

Seperti diuraikan diatas secara historis dan sosiologis, kebangsaan bahkan kabilahisme, adalah sesuatu yang natural, kodrati. Karena itu kalau kita merasa Indonesia ini adalah bangsa paling hebat, itu boleh-boleh saja. Meskipun tidak pernah terkatakan, tetapi *"right or wrong is my nation"*, ada di hati kita masing-masing. Itu kodrat setiap bangsa. Masalahnya sekarang, aktualisasi kebangsaan dari satu kurun ke

kurun lainnya senantiasa mengalami perubahan dinamis. Tetapi, perlu ditekankan, di dalam konteks apa pun dan kapan pun, yang namanya kebangsaan itu esensinya ialah kesetiaan sejak awal sampai akhir kepada tanah air kita. Ini sama sekali tidak berarti kita mempertuhankan tanah air, lalu menjadi musyrik. Tidak! Kesetiaan kepada tanah air itu konsep politik. Bukan konsep teologis.

Yang penting di dalam perubahan dinamis pemikiran kebangsaan itu, tentang bisa berlainan dari waktu ke waktu esensi tetap sama.

Pada saat dijajah, manifestasi rasa kebangsaan adalah merebut, arti kebangsaan sekarang tentu bagaimana mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan sebaik-baiknya.

Arus Utama

Beberapa tahun terakhir ini, *nation-state* dihadapkan kepada fenomena-fenomena baru yang sangat aneh.

Setelah perang dingin usai, kita banyak menyaksikan *nation-state* yang pecah berantakan. Ada dua arus utama di penggung dunia sekarang ini yang saling bertabrakan. *Pertama*, gerakan *sentripetal*, dari berbagai bagian kecil-kecil menuju kepada kesatuan yang lebih besar. Pada saat yang sama terjadi gerakan kedua, yakni gerakan sentrifugal, disintegrasi dari bagian besar menuju ke bagian-bagian yang lebih kecil.

Sebelum perang dingin usai, Dr. Henry Kissinger berpendapat bahwa setelah perang dingin usai akan terjadi nasionalisme yang lebih luas di mana bangsa-

bangsa yang berada dalam suatu wilayah tertentu suatu saat akan menggabungkan diri menjadi suatu federasi bangsa-bangsa. Kissinger bahkan meramalkan, suatu saat akan ada *United State of Europe.* Tetapi, ramalan Kissinger itu sampai sekarang masih omong kosong.

Mengapa sampai sekarang ASEAN tidak pernah berhasil kecuali di bidang-bidang seperti festival kebudayaan dan bebas visa masuk, itu karena kepentingan nasional masing-masing negara anggota masih jauh lebih besar dan lebih unggul dibandingkan dengan kepentingan regional ASEAN.

Salah satu sebab bangkrutnya Uni Soviet, karena pertentangan etnis yang amat tajam. Pecahnya Chekoslovakija menjadi Cheko dan Slovakia, pun karena pertentangan tajam antara orang-orang Cheko dengan orang-orang Slovakia. Srilangka sekarang juga dihadapkan kepada hal-hal yang sangat rawan karena pertentangan etnis. Para pemimpin India, tidak dapat tidur nyenyak, karena pertentangan etnis sangat tinggi di sana, dan setiap saat dapat mengancam keutuhan negara tersebut.

Indonesia kita ini mempunyai 13.677 pulau, ada lima agama resmi yang diakui, ada lebih 200 suku bangsa, ada lebih dari 300 bahasa daerah, tetapi bahwa kita bisa berbhineka tunggal ika, karena kebangsaan seperti yang kita pahami sudah merata dari Sabang sampai Merauke. Dan, saya yakin seyakin-yakinnya, lem perekat yang paling hebat untuk negara kesatuan kita ini adalah Islam.

Dari kenyataan itu kita memang harus *concern* untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan

bangsa, tetapi, kebangsaan kita bisa utuh, kompak, kuat, dan republik ini tidak pernah guncang meskipun amat pluralistik, itu karena perekat utamanya bernama Islam.

Kalau misalnya pulau Jawa seluruhnya beragama Islam. Kalimantan Hindu, Sumatra Kristen, Sulawesi Katolik, dan Irian Jaya Budha, niscaya sudah sejak dulu Republik ini pecah. Karena Islam dianut oleh mayoritas bangsa, dan terserak-serak di seluruh kepulauan kita, maka jadilah Islam sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Asal tidak jatuh kepada *xenophobia*, secara teologis Islam mendorong kebangsaan.

Mamal

Kalau akhir-akhir ini ada orang-orang yang sok jagoan dalam nasionalisme, meminjam istilah wakil ketua DPA, prof. Dr. Suhardiman, mereka itu adalah "mamal" (maling teriak maling).

Orang boleh berbicara saja, tetapi mestinya orang tersebut melihat kepada dirinya sendiri, apakah yang telah disumbangkannya untuk keutuhan bangsa ini.

Anak-anak SLTA pun tahu, wujud paling kongkrit dari kebangsaan adalah berbuat baik semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bangsa ini. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan koruptif, adalah orang-orang yang anti kebangsaan. Karena mereka menggerogoti bangsa ini sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan bangsa ini mengalami kerawanan.

BUKU-BUKU TERBITAN

Mujahid

1. *Kudung Gaul, Berjilbab tapi Telanjang,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
2. *Muslimah yang Kehilangan Harga Diri,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
3. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern,* Abu Al-Ghifari, Rp 18.000
4. *Bila Jodoh Tak Kunjung Datang,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
5. *Romantika Remaja (Kisah-kisah Tragis dan Solusinya dalam Islam),* Abu Al-Ghifari, Rp 18.000
6. *Kado Pernikahan Buat Generasiku,* H. Subhan Nurdin, Rp 15.000
7. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
8. *Kesucian Wanita,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
9. *23 Kiat Disayang Suami,* Muhammad Rasyid 'Uweid, Rp 11.000
10. *Generasi Narkoba,* Abu Al-Ghifari, Rp 7.000
11. *Fiqih Musik dan Lagu Perspektif Al-Quran dan As-Sunah,* Dr. Yusuf Qardhawi Rp 25.000
12. *Menggapai Surga dengan Tulisan, Kiat Menjadi Penulis Sukses Panduan untuk Generasi Muda Islam,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
13. *Wanita Ideal Dambaan Pria Sejati,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
14. *Generasi Muda Islam di Ambang Kehancuran,* Haris Firdaus, Rp 13.000
15. *Remaja dan Cinta, Memahami Gelora Cinta Remaja dan Meyelamatkannya dari Berhala Cinta,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
16. *Risalah Shalat, Soal-jawab Tentang Shalat dan Kaifiyah Singkat Shalat,* Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Rp 13.000
17. *7 Sifat Negatif Manusia,* Haris Firdaus, Rp 7.000
18. *Santri NU Menggugat Tahlilan,* Harry Yuniardi, Rp 10.000

19. *7 Perangkap Yahudi,* Abu Al-Ghifari, Rp 7.000
20. *Nasyid Versus Musik Jahiliyyah,* Dr. Yusuf Qardhawi, Rp 10.000
21. *Badai Rumah Tangga,* Abu Al-Ghifari , Rp 20.000
22. *Pacaran yang Islami, Adakah?,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
23. *Nurani Cinta Yang Hilang,* Abu Al-Ghifari, Rp 15.000
24. *Mewaspadai Tipe "Pria Berbahaya",* Luqman Haqani, Rp 15.000
25. *Menjalin Cinta Suci,* Nabil Hamid Al-Ma'az, Rp 13.000
26. *Zionis Israel, Di Balik Invasi AS Ke Irak, Upaya Menciptakan Israel Raya,* Usep Romli HM., dkk, Rp. 13.000
27. *Remaja Korban Mode,* Abu Al-Ghifari, Rp. 17.500
28. *700 Mutiara Nasihat, Menuju Islam Kaffah,* Choiruiddn Hadhiri SP. Rp. 25.000
29. *Ungkapkan Isi Hati Melalui Puisi,* Luqman Haqani, Rp. 10.000
30. *Risalah Cinta Muslimah,* Khalid As-Sayyid Abul 'Aal, Rp 12.000
31. *Wanita Bukan Makhluk Penggoda,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
32. *Bergaul dengan Kesalahan,* Abdurrahman Always Al-Madkhali, Rp 10.000
33. *Pengantin Surga,* Abul Miqdad Al-Madany, Rp 15.000
34. *Jalan Pintas Menjadi Bintang Pelajar,* Choiruddin Hadhiri S, Rp 15.000
35. *Benalu-benalu Kalbu,* Haris Firdaus, Rp 12.000
36. *Musuh yang Jadi Idola,* Luqman Haqani, Rp 12.000
37. *Saat Fitnah Menghadang,* Abul Miqdad Al-Madany, Rp 10.000
38. *Percaya Diri Sepanjang Hari,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
39. *Menjadi Bidadari Dunia Akhirat,* Mas Udik Abdullah, Rp 10.000
40. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat,* Abu Al-Ghifari, Rp 10.000
41. *Indahnya Malam Pertama,* Abu Nabhan Faqih dan H. Subhan Nuridin, Rp 15.000
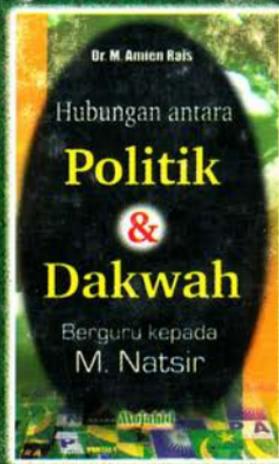
Islam datang sebagai rahmatan *lil'alamiin.* Hukum-hukum yang dibawanya sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu salah jika Islam tidak terkait dengan politik. Islam menaruh perhatian besar terhadap masalah politik. Terlebih lagi masalah tersebut erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat. Bagaimana pun masyarakat tanpa tatanan politik yang Islami sama dengan membiarkan kerusakan di muka bumi yang sangat dikecam Islam.

Buku ini memaparkan bagaimana pentingnya keterlibatan Islam dalam politik. M. Amien Rais yang dikenal sebagai lokomitif reformasi Indonesia mencoba memaparkannya untuk Anda. Walaupun pembahasannya tidak rinci karena buku ini merupakan kumpulan tulisan beliau, tapi penyunting berusaha keras agar masing-masing tulisan memiliki keterkaitan yang erat. Karena itu, terlepas dari baju partai yang Anda pakai, buku ini sayang sekali jika Anda lawatkan. Selamat membaca!